

**STUDI RESISTENSI MASYARAKAT PINGGIR HUTAN
DI DESA SIDODADI DUSUN MANDIKU KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

MEYCO DANU PRADANA
NIM : 204103020006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2024**

**STUDI RESISTENSI MASYARAKAT PINGGIR HUTAN
DI DESA SIDODADI DUSUN MANDIKU KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Prodi Studi Pengembangan Masyarakat Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Meyco Danu Pradana
NIM : 204103020006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2024**

**STUDI RESISTENSI MASYARAKAT PINGGIR HUTAN
DI DESA SIDODADI DUSUN MANDIKU KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh :
Meyco Danu Pradana
NIM : 204103020006

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Muhammad Ardiansyah, M. Ag.
NIP. 197612222006041003

**STUDI RESISTENSI MASYARAKAT PINGGIR HUTAN
DI DESA SIDODADI DUSUN MANDIKU KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim penguji

Ketua

Achmad Faesol, M.Si
NIP. 198402102019031004

Sekretaris

Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M.
NIP. 199107072019032008

Anggota

1. Dr. Minan Jauhari, M.Si.

2. Muhammad Ardiansyah, M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah

Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا تَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

"Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur"¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ <https://qur'an.nu.or.id/al-araf/58>, QS. Al-A'raf ayat 58.

PERSEMBAHAN

Skripsi yang disusun ini penulis mengucapkan sebagai rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau-beliau yang memberikan semangat dan motivasi, dukungan serta doa, sehingga skripsi ini terselesaikan, Beliau diantaranya :

1. Ibuk Nuning Islamiah dengan Bapak Bambang Setiawan adalah orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang tulus yang dikhususkan untuk penulis menjadi semangat dalam melakukan segala hal yang membawa banyak manfaatnya
2. Matho Yani Izzul Khaq, Galang Putra Lamong, Zahrul Fuadi, Hasbi Ahmad Ainul Yaqin, Ekayasa Candra Winata, Sandy Wahyu, Iqbal Avivi, Nur muhammad Asadulloh, Eko Suhriyanto dan Shollahudin Al Ayyubi, adalah teman-teman yang selalu memberikan dukungan dikala kesulitan maupun kesenangan dan memotivasi untuk terus melangkah ke hal kebaikan.
3. Saudara Jaelani, merupakan pembibing lapangan di Gapoktanhut, yang selalu membantu dalam penggalian informasi mengenai hal-hal yang terkait, serta memberikan dukungan dan mengorbankan waktunya, serta memberikan ilmu dan pengalamannya. Peneliti mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan baru yang terjadi dilapangan, karena terkadang teori dan realita dilapangan tidak sesuai. Hal itu, peneliti merasa bersyukur untuk penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu.

4. Ekayasa Candra Winata dan Rafli Cahyono, adalah orang-orang yang selalu berada dalam setiap langkah perjuangan dalam pengerjaan serta menemani penggalian informasi. Jangan menyerah sebelum berhasil.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan Kesehatan yang diberikan dalam menempuh Pendidikan serta pengerjaan skripsi yang berjudul “*Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan Di Desa Sidodadi Dusun Mandiku*” ini bisa dikerjakan dengan tepat waktu yang ditentukan. Hal ini di kerjakan sesuai dengan penempuhan Pendidikan sarjana S1 dengan mendapatkan gelar (S.Sos) dalam jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini tidak terselasaikan dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan kepada pihak tertentu. Maka, dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Achmad Faesol, M.Si. Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak Muhammad Ardiansyah, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan masukan dan arahan, serta ilmu baru kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan dalam penyusunan skripsi.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman mulai dari menempuh Pendidikan hingga terselainya Pendidikan dibangku perkuliahan.

6. Kepada masyarakat petani hutan dan Gapoktanhut yang memberikan ruang bagi penulis dalam melakukan penelitian terkait perhutanan sosial di Desa Sidodadi Dusun Mandiku.

Peneliti memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu dan membimbing dalam pengerjaan skripsi ini. Atas bantuan dan arahan menjadikan peneliti bisa mengerjakan skripsi dengan maksimal. Peneliti paham bahwa dalam penulisan ini masih banyak yang kurang, maka diperlukan atas kritik dan saran untuk membuat skripsi ini bisa sempurna dan bermanfaat bagi yang membaca.

Jember, 14 Mei 2024
Penulis

Meyco Danu Pradana
204103020006

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Meyco Danu Pradana, 2024 : *Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan Di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : Resistensi, Substensi, Bentuk Perlawanan, Kebijakan, Hutan Kemitraan, Hutan Kemasyarakatan

Desa Sidodadi merupakan daerah yang mempunyai kawasan hutan produksi yang aktif di kelola masyarakat dan bertempat tinggal menetap pada kawasan hutan produksi tersebut. Dalam Desa Sidodadi terdapat 2 lembaga yang masuk pada wilayah TORA dan PS, dua Lembaga ini mempunyai fokus yang berbeda, pada wilayah TORA berfokus pada pemukiman warga dan PS berfokus pada pengelolaan hutan. Untuk melakukan pengelolaan hutan, masyarakat petani hutan membentuk Gabungan Kelompok Tani Hutan yang bertujuan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengelola hutan dengan penanaman sesuai dengan kebutuhan substensi. Pengelolaan hutan ini mengusung skema hutan kemitraan dengan Perhutani dengan tujuan saling mendapatkan keuntungan dalam mengelola hutan, kemitraan dengan Perhutani sejak tahun 2019 pada nomor SK 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019. Namun, sistem kerjasama ini tidak berjalan sesuai dengan rencana karena perbedaan kebijakan antara masyarakat petani hutan dengan Perhutani dalam sistem pengelolaan hutan, sehingga melahirkan perlawanan dan pertentangan masyarakat kepada Perhutani.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana bentuk resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data memakai model analisis Sugiyono yang terdiri mulai pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan atau pengujian kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

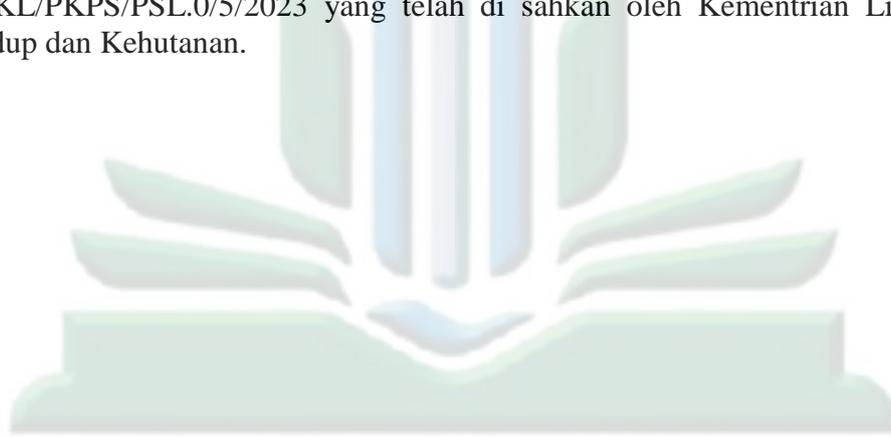
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku.

2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo.

Penelitian ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan dan bentuk resistensi masyarakat pinggir hutan kepada Perhutani untuk mempertahankan sistem penanaman sesuai dengan kebutuhan substensinya. Resistensi dari masyarakat mulai terlihat dengan diterapkannya skema Kemitraan dengan Perhutani yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan dan saling menguntungkan. Penelitian ini

menggunakan konsep resistensi dari James C. Scott. Scott melihat perlawanan sehari-hari khas kaum tani baik secara tertutup maupun terbuka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat petani hutan sangat menganggungkan kehidupannya pada hutan sebagai aktivitas di sektor pertanian, serta faktor terjadinya perlawanan masyarakat petani hutan berada pada 2 lembaga yaitu TORA dan PS, masyarakat petani hutan melakukan bentuk perlawanan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Perlawanan itu dilakukan oleh kelas sosial masyarakat yang berbeda yaitu kaum bawah dan kaum atas, aksi perlawanan kelas atas dengan melakukan protes sosial secara langsung terhadap penguasa lahan dan aksi perlawanan kelas bawah melakukan pencurian kayu milik Perhutani dan pembiaran lahan kosong tidak terurus. Aksi perlawanan secara terbuka ternyata berhasil mengubah skema hutan menjadi hutan kemasyarakatan pada tahun 2023 dengan nomor SK SK.5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023 yang telah di sahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian	26
Tabel 3.1 Data Informan	40
Tabel 4.1 Perpindahan Skema Hutan	56
Tabel 4.2 Faktor Perlawanan Masyarakat	56
Tabel 4.3 Bentuk Perlawanan Masyarakat	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Sidodadi.....	39
Gambar 3.2 Daftar Anggota Pengelola Hutan Aktif.....	41
Gambar 4.1 Kawasan Hutan Mandiku.....	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Gapoktanhut.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hutan dan kehutanan merupakan bagian yang sangat penting dari siklus lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup dunia yang selama ini kita tinggali, sebab hutan merupakan pengatur keseimbangan ekosistem wilayah di bumi. Kehutanan merupakan sektor strategis, karena hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem.²Namun, masi ada kelompok-kelompok yang membuat kerusakan hutan karena keserakahannya sehingga menyebabkan munculnya problem di tengah masyarakat. Program reforma agraria dijadikan sebagai program nasional oleh Presiden Joko Widodo. Dalam UUD 1945 melalui pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dibuat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” termasuk pengertian dari reforma agraria³.

Reforma agraria merupakan program yang akan membangun dari wilayah pinggiran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan program ini sebagai prioritas pemerintah. Reforma agraria merupakan konsolidasi dan alokasi penguasaan, penggunaan lahan dan kepemilikan lahan, baik tanah di desa maupun di hutan⁴. Di dalamnya ada dua hal yang diperhatikan pemerintah, yaitu tanah objek reforma agraria (TORA) dan

² Wahyu Wiriadinata, dalam jurnal Kehutanan di Indonesia dalam perspektif ekonomi, ekosistem dan hukum,151-152.

³ Ardi Ridwansyah, dalam berita nasional, link [Ketika Reforma Agraria Terus Dibelit Konflik Lahan | Berita Terkini, Independen, Terpercaya | KBR ID](#)

⁴ Wahyu Wiriadinata, 153-154.

perhutanan sosial (PS). Dalam praktiknya, lahan yang termasuk dalam TORA dan PS akan dibuat perklaster dan dikelola oleh kelompok masyarakat terutama untuk diberdayakan di bidang pangan untuk kebutuhan substensi.

Perhutanan sosial adalah program yang implementasinya rumit dengan kualitas tinggi. Setidaknya ada tiga pilar jika perhutanan sosial ingin mencapai target seluas itu yaitu kemampuan, kesiapan dan ketrampilan penyuluh kehutanan serta pendampingan petani hutan sosial dan kemampuan, kesiapan dan kemauan pemerintah dalam memfasilitasi seperti permodalan, pemasaran dan perizinan: masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang mau membentuk kelompok tani (Gapoktanhut). Untuk perhutanan sosial, pemerintah mengalokasikan 10% kawasan hutan Indonesia atau 12,7 juta hektar hutan untuk lima tahun pertama (2014-2019). Hingga tahun 2019, baru 6.411 izin hutan seluas 4,04 juta hektare yang diterbitkan kepada 818.457 kepala keluarga⁵. Dampak langsungnya adalah luas hutan untuk perhutanan sosial bertambah sekitar 1 juta hektar, khususnya di Pulau Jawa. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah 23/2021, kawasan hutan ini akan dikeluarkan dari kawasan Perhutani seluas 2,4 juta hektar dan diubah menjadi kawasan hutan yang dikelola khusus. Dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2014, dukungan terhadap peraturan perhutanan sosial sangat minim.

Dalam konteksnya, hal ini tersirat dalam PP 6/2007. Pasal 83 dan 84 mengatur bahwa masyarakat lokal harus diberdayakan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan adil dari sumber daya hutan dengan memberikan

⁵ Pramono Dwi Susetyo, dalam artikel “Problem mendasar perhutanan sosial”, link <https://www.forestdigest.com/detail/1178/problem-perhutanan-sosial>, 19-Jun-2021.

akses dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui: hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan kemitraan akan memberikan akses pemberdayaan masyarakat sekitar. Terdapat lima program kehutanan dalam perhutanan sosial, antara lain Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Kemitraan (KK), Hutan Adat (HA), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Permasalahan lainnya adalah kesalahan penetapan sasaran perhutanan sosial berdasarkan wilayah. Praktiknya, penyuluhan dilakukan kepada kelompok tani yang mengelola usaha perhutanan sosial. Dengan luas hutan perhutanan sosial yang dikelola kerap terjadi ketidaksinkronan antara program kebijakan perhutani dengan masyarakat tani hutan yang membuat munculnya problem di tengah masyarakat terutama masyarakat pinggir hutan.

Kabupaten Jember merupakan sebuah kabupaten yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember terletak di lereng Gunung Argopuro yang memanjang ke selatan hingga Laut Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai posisi dan peran strategis sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat (PKW). Kabupaten Jember merupakan wilayah yang mempunyai kawasan hutan aktif yang di kelola masyarakat, mulai dari skema hutan desa, hutan kemitraan, hutan produksi, dan hutan kemasyarakatan.

Dengan kawasan hutan yang dimiliki dan dikelola aktif oleh masyarakat, Kabupaten Jember mampu memproduksi dari hasil pertanian hutan seperti produksi kopi, durian, jambu kristal, dan lain-lain. Kawasan

hutan wilayah Pengelolaan Kabupaten Jember terbagi menjadi tiga wilayah Departemen Kehutanan (BH): BH Selatan, BH Jember Selatan, dan BH Semporan. Tujuh kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu BKPH Han Barat, BKPH Lereng Timur, BKPH Sumberdjangbe, BKPH Mayang, BKPH Ambul, BKPH Urhan, BKPH Semporan dan 24 kawasan Hutan Rishot Pemangkuan (RPH).

Berdasarkan hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2021, kawasan hutan KPH Jember terdiri atas kawasan produksi seluas 22.20,48 ha (30,93%), kawasan perlindungan seluas 7.960,08 ha (11,08%), kawasan penggunaan lain seluas 2.007,24 ha (2,41%) dan hutan lindung seluas 39.614,13 ha (55,18%).⁶ Dalam luas wilayah hutan di Kabupaten Jember terdapat pembagian luas tanah hutan di daerah pedesaan untuk mendapatkan hak kelola hutan bagi masyarakat pinggir hutan. Kawasan hutan menjadikan sebuah keuntungan bagi masyarakat yang mengelola untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya dan membantu mengurangi angka pengangguran yang terjadi di masyarakat. Dalam pedesaan yang memiliki kawasan hutan juga membentuk lembaga untuk mengelola hutan dengan terstruktur, mempunyai kebijakan dan berprinsip yang dapat diterapkan kepada masyarakat seperti gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut). Hal itu terjadi di Desa Sidodi Kabupaten Jember.

Desa Sidodadi Kabupaten Jember terletak di arah selatan dari Ibu Kota Kecamatan Tempurejo dengan jarak \pm 9 km, termasuk wilayah kerja korcam

⁶ Imam suyuti, dalam internet KPH Jember 2022 link <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-jember/>

balung dengan jarak \pm 21 km dan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 30 km. Dengan luas wilayah seluruhnya 2645,377 Ha (26,453 km). Desa Sidodadi terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Jatirejo, Dusun Mandiku. Pada umumnya keadaan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Desa Sidodadi mayoritas adalah petani. Kehidupan sosial budaya masyarakat adalah mayoritas beragama Islam 11.203 jiwa (99,87%) sedang Agama Kristen dan Katolik 6 jiwa (0,13%).⁷ Dusun Mandiku merupakan bagian dari Desa Sidodadi yang mempunyai luas hutan keseluruhan adalah 743 hektar dengan skema hutan kemitraan. Hutan sebagai bagian yang terpadu dan tidak bisa dijauhkan dari kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut, menurut Prasetya tunggal adalah hutan memiliki hubungan timbal balik yang terjalin dengan masyarakat sekitarnya dan sulit untuk dipisahkan.⁸ Seperti halnya masyarakat di Desa Sidodadi Dusun Mandiku sangat mempertahankan hutan yang dikelola selama bertahun-tahun. Karena, masyarakat aktivitas kesehariannya sebagai petani hutan dan kebergantungan pada hutan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.

Masyarakat petani hutan di Dusun Mandiku menerapkan penanaman dengan prinsip penghijauan hutan untuk jenis tanaman sesuai kebutuhan substensi masyarakat. Sistem yang diterapkan masyarakat adalah sistem jangka panjang dan berkelanjutan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan dengan hasil yang stabil. Menurut Azis muslim, pemberdayaan dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan

⁷ Sidodadi.net. April 07, 2022, link <https://sidodadi.net/index.php/profil-des/>

⁸ Lindungi hutan, "Pengertian hutan menurut para ahli." Maret, 2023, dalam link internet <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-hutan-menurut-ahli/>

melalui pengembangan keterampilan untuk mengatasi permasalahan mendasar dan perbaikan kondisi kehidupan sesuai dengan harapan masyarakat.⁹ Masyarakat pinggir hutan Dusun Mandiku melihat adanya peluang untuk mengelola hutan dengan apa yang seharusnya dibutuhkan secara berkelanjutan dan meningkatkan kondisi hidup mereka. Maka, masyarakat memanfaatkan hutan dengan kebutuhan substensinya.

Jenis tanaman di kawasan hutan Dusun Mandiku yaitu seperti tanaman buah jambu kristal, durian, cabai, jagung, dan terong. Namun, dengan skema hutan kemitraan dengan perhutani masyarakat mengalami ketidak sinkronan karena adanya program dan kebijakan dari perhutani yang bersebrangan dengan masyarakat, sehingga masyarakat berencana mengubah skema hutan menjadi hutan kelola masyarakat dengan tujuan mempertahankan hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan.

“ mosok kebijakan seng di terapno nang masyarakat malah ngrugikno, jarak tandur tambah di cedekno, jauk di tanduri kayu seng panene puluhan tahun sepisan, kan yo iku malah ngrugikno masyarakat dan ngrusak tanduran seng awal. seumpomo masyarakat nerimo kebijakan iku, bakale mudun pendapatane wong kene, seng awale panen 1 wulan sepisan malah dadi panen puluhan tahun sepisan, kan yo ga nutut nang kebutuhane masyarakat. Maneh-maneh pas di tanduri kayu kan ganggu nang tanduran liyane koyok jagung, lombok, buah jambu krital, mbe liyan-liyane”¹⁰. Ujar dari bapak Jaelani selaku anggota dari Gapoktanhut Sidomukti Desa Sidodadi.

Dari informasi diatas, maka masyarakat melakukan bentuk perlawanan dengan berani bersuara secara terbuka karena kebijakan dan program yang di tentukan oleh Perhutani membuat masyarakat mengalami kerugian dan

⁹ Repository UIN Suska, Pemberdayaan masyarakat, dalam bab II landasan teoritis.

¹⁰ Jaelani, *Wawancara*, Jember, 21 mei 2023

perubahan sistem pengelolaan tanaman hutan. Tidak hanya itu saja, masyarakat melakukan bentuk perlawanan secara tertutup dengan membiarkan tanah hutan yang dikelola perhutani tidak terurus dan melakukan pencurian kayu milik Perhutani. Resistensi (perlawanan) menurut Michael Hardt merupakan fenomena yang mengacu pada situasi sosial dimana pihak-pihak yang berada pada posisi yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikan dirinya¹¹.

Berbagai konflik masyarakat pinggir hutan kerap terjadi dengan pihak perhutani, dan berbagai tempat justru menunjukkan perlawanan atau resistensi yang semakin meningkat. Meski berbagai kebijakan pemerintah diterapkan untuk meminimalisir tingkat konflik, ternyata perlawanan tetap saja terjadi. Fenomena yang kerap terjadi di lapangan dan menyebabkan konflik pada masyarakat pinggir hutan adalah konflik agraria yang mengancam hak-hak dan ruang kehidupan masyarakat. Menurut Syamsurizal Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Konflik agraria merupakan akibat ketidakadilan struktural, namun masih dianggap konflik horizontal. Tanah rakyat disita untuk kepentingan segelintir elit oligarki yang tidak pernah puas¹². Seperti halnya yang terjadi di wilayah hutan Desa Sidodadi, Dusun Mandiku, Kecamatan Tempurejo. Berawal dari tindakan Perhutani yang mengklaim tanah di Dusun Mandiku sebagai kawasan hutan produksi dengan memasang patok-patok tapal batas di wilayah tersebut.

¹¹ Ilham fikriansyah, detikBali, Pengertian resistensi, 2022

¹² Komisi II, Konflik agraria 2023, dalam link <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44063/t/Konflik+Agraria+Adalah+Buah+Ketidakadilan+Struktural>

Dengan adanya klaim tersebut memicu kemarahan masyarakat, sehingga melahirkan aksi perlawanan masyarakat pinggir hutan. Mendengar kabar perbatasan, perhutani mulai tertarik dengan pengelolaan wilayah melalui penanaman pohon secara besar-besaran pada pemukiman warga yang status kepemilikan tanahnya bukan milik pribadi. Namun, hal ini membuat masyarakat khawatir bahwa tanah leluhur yang telah mereka tinggali secara turun-temurun akan dikuasai pihak lain.. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga meresahkan tempat pertaniannya yang merupakan sumber penghasilan dalam mengelola hutan sejak bertahun-tahun akan mengalami kerugian dan kerusakan.

Konflik tanah mandiku telah semakin redup, karena masyarakat terus mempertahankan tanahnya supaya tempat tinggal mereka tidak keganggu, konflik tanah mandiku terjadi pada tahun 2008 dan perkembangan sampai saat ini tahun 2024 konflik tersebut sudah sementara aman, akan tetapi bukan hanya permasalahan reforma agraria saja yang terjadi di Desa Sidodadi, namun muncul isu problem baru pada perhutanan sosial dalam kawasan hutan produksi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu perbedaan pembentukan kebijakan antara masyarakat dan Perhutani didalam skema hutan kemitraan untuk mengelola hutan yang membuat masyarakat merasa khawatir kehilangan sumber daya tanah yang ditempati secara turun temurun mengalami perubahan. Hal itu membuat kelompok tani hutan melakukan perjuangan untuk mempertahankan hak masyarakat petani hutan untuk mengelola hutan sebagai lahan pertanian dengan prinsip penghijauan dan

melakukan perpindahan skema hutan menjadi hutan kelola masyarakat. Dengan aksi perlawanan dan penentangan kepada pihak Perhutani, masyarakat petani hutan berhasil mengubah skema hutan menjadi hutan kemasyarakatan pada tahun 2023 dengan nomor SK.5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023.

Keresahan masyarakat inilah yang menyebabkan timbulnya perlawanan kaum tani hutan di Dusun Mandiku Desa Sidodadi. Sebagai Mahasiswa penjurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan fokus Studi Masyarakat Marginal yang mempelajari tentang perhutanan sosial dan studi konflik. Maka, dengan adanya problem yang muncul di lapangan terutama masyarakat yang termarginalkan sebagai kaum yang tertindas menjadi perhatian Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam. Berdasarkan deskripsi diatas maka penulis mengambil judul **“Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang berupa pertanyaan yang nantinya akan dicari jawabannya melalui proses penelitian¹³. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

¹³ Zainal Abidin, *“Pedoman Karya Tulis Imiah Universitas Kiai Achmad Shiddiq Jember”*, 9.

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana bentuk resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan penjelasan kedepan yang ingin ditempuh ketika melakukan penelitian. Tujuan peneliti harus berkaitan dan konsisten dengan masalah yang dirumuskan dalam fokus penelitian¹⁴. Dalam penelitian perlu dijelaskan arah penelitian secara objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terletak pada kontribusi apa yang dapat anda berikan setelah penelitian selesai. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, lembaga, dan masyarakat

¹⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Pedoman karya ilmiah, 2022.

secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis. Maka dalam penelitian ini manfaatnya adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yaitu untuk saluran pengetahuan dalam kajian penelitian sosiologi dan pemberdayaan tentang masyarakat hutan. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan studi masyarakat marginal masyarakat pinggir hutan terkait penerapan program dan kebijakan perhutani yang dirasa dapat merugikan serta mengancam kebutuhan substensi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk mata kuliah di program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dalam ilmu tentang perhutanan sosial dan studi konflik dipenjurusan Studi Masyarakat Marginal (SMM).

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian adalah untuk menjadikan pedoman perhutani dalam penerapan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pinggir hutan. Penelitian ini juga diharapkan kepada perhutani dan masyarakat dapat memperbaiki sistem yang selama ini dijalankan agar terciptanya keselarasan dan saling menguntungkan antara kebutuhan masyarakat dan perhutani. Penelitian ini juga diharapkan Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, hal ini dapat menjadi sebuah prestasi bagi keluarga besar ulama sebagai

bagian dari karya intelektual yang dapat dijalankan dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan akademik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah bagian yang menjelaskan istilah-istilah penting dalam judul penelitian yang menjadi titik perhatian. Tujuan definisi istilah adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang digunakan oleh peneliti ¹⁵

1. Resistensi

a. Pengertian Resistensi

Resistensi atau perlawanan merupakan suatu tindakan menentang, menghalau, melawan suatu perintah yang datang dari luar. O'connor menjelaskan bahwa resistensi adalah suatu sikap menolak, menentang, menyanggah dari pada anggota organisasi untuk bekerja sama dengan organisasi seiring dengan upaya untuk perubahan.

Resistensi (perlawanan) menurut Michael hardt merupakan fenomena yang mengarah pada situasi sosial dimana pihak-pihak yang berada pada posisi yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat melakukan perlawanan terhadap kelompok yang merugikan dirinya.¹⁶

Kebijakan dan program yang telah dibuat di Desa Sidodadi Dusun Mandiku dengan hasil persetujuan dan kebutuhan masyarakat sudah dibentuk dan dijalankan. Kebijakan yang sudah terbentuk tersebut memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat untuk

¹⁵Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Pedoman karya ilmiah, 2022.

¹⁶ Muhammad rifa fitrah muarif, Resistensi dalam kajian manajemen perubahan dan pendidikan, 2022.

mengelola hutan dengan tanaman sesuai kebutuhan dan jangka panjang. Namun, dari kebijakan perhutani kepada masyarakat tergolong rawan merugikan masyarakat dan membuat tanaman yang lama menjadi rusak dan tidak bisa panen sebagaimana mestinya. Ketidak sinkronan tersebut membuat masyarakat melakukan penolakan terhadap kebijakan yang dibuat oleh perhutani, kebijakan tersebut yakni meminta kepada masyarakat untuk menanam kayu dengan musim panen puluhan tahun sekali.

2. Perhutanan Sosial

a. Pengertian perhutanan sosial

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk mensejahterakan masyarakat. Dinamika sosial budaya dan keseimbangan lingkungan demi membentuk skema hutan antara lain hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Program ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial menolak anggapan masyarakat bahwa kawasan hutan disekitarnya sulit untuk dimanfaatkan¹⁷.

¹⁷ Perhutanan sosial, Pengertian, tujuan, skema dan tata cara permohonan, Dalam link <https://cdkmalang.dishut.jatimprov.go.id/perhutanan-sosial-pengertian-tujuan-skema-dan-tata-cara-permohonan/>

Dengan adanya program tersebut masyarakat di Desa Sidodadi mendapatkan keuntungan untuk pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya. Kawasan hutan di Desa Sidodadi merupakan skema hutan kemitraan dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan dengan kebutuhan substensi. Memanfaatkan hutan tentu saja membuat masyarakat menjadi ketergantungan karena aktivitas sehari-harinya adalah petani yang mengelola hutan. Masyarakat menganggap bahwa hutan adalah mempunyai hubungan timbal balik apabila kita mengolah dengan baik, maka hasilnya akan baik dan sebaliknya.

b. Hutan Kemitraan

Hutan kemitraan adalah upaya kerjasama antara masyarakat petani hutan dengan Perhutani dalam mengelola hutan, seperti pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. Desa Sidodadi Dusun Mandiku merupakan kawasan hutan yang berskema kemitraan kehutanan¹⁸. Dalam mitra ini masyarakat berkejasama dengan perhutani untuk mengelola hutan dan bagi hasil. Kebijakan dan program yang ada di Desa Sidodadi adalah masyarakat melakukan penanaman di hutan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan sehari-hari sebagai bentuk memberdayakan masyarakat pinggir hutan.

¹⁸ Perhutanan sosial kehutanan Lampung, Areal perhutanan sosial, dalam link [https://dishut.lampungprov.go.id/pages/perhutanan-sosial#:~:text=Kemitraan%20Kehutanan%20\(KK\)%20merupakan%20adanya,Usaha%20Industri%20Primer%20Hasil%20Hutan](https://dishut.lampungprov.go.id/pages/perhutanan-sosial#:~:text=Kemitraan%20Kehutanan%20(KK)%20merupakan%20adanya,Usaha%20Industri%20Primer%20Hasil%20Hutan)

Sedangkan dari kebijakan perhutani meminta masyarakat untuk mengelola hutan dengan tanaman kayu dan mengubah jarak tanam kebutuhan substensi masyarakat semakin di dekatkan sehingga masyarakat menganggap bahwa akan merusak tanaman yang masyarakat kelola. Dari kebijakan yang bersebrangan tersebut maka masyarakat melakukan penentangan dan menginginkan untuk merubah skema hutan menjadi hutan kemasyarakatan.

c. Hutan kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan adalah hutan milik Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun, rencana untuk mengubah skema hutan menjadi hutan kemasyarakatan belum memenuhi syarat sehingga tidak bisa di tetapkan langsung untuk mengubah skema hutan. Akan tetapi masyarakat Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) di Desa Sidodadi masi berusaha untuk mengumpulkan data-data dalam proses pengubahan skema hutan kemitraan menjadi hutan kemasyarakatan.

3. Kebutuhan Substensi

Substensi adalah pengelolaan lingkungan sumber daya hutan yang bertumpu pada masyarakat, harapan mewujudkan kemampuan masyarakat lokal untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya melalui pengelolaan sumber daya

hutan yang dimilikinya, dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupannya.¹⁹ Seperti halnya yang terjadi di Desa Sidodadi Dusun Mandiku, masyarakat mengelola hutan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya dan mencukupi pendapatan perekonomiannya melalui pengelolaan hutan guna untuk memberdayakan masyarakat pinggir hutan. Masyarakat di Desa Sidodadi memanfaatkan hutan dengan jenis tanaman berupa cabai, jambu kristal, durian, terong, dan ubi. Guna untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan dapat berkelanjutan untuk pendapatan perekonomian dengan hasil panen dari mengelola hutan.

4. Masyarakat tani pinggir hutan

Masyarakat tani pinggir hutan pada umumnya tidak memiliki lahan pertanian, mereka bertahan hidup sebagai pesanggem dengan lahan garapan yang mereka dapat dari lahan negara di kawasan hutan, dan hasilnya untuk menghidupi keluarganya.²⁰ Masyarakat pinggir hutan umumnya kehidupannya adalah petani yang bergantung pada alam atau pada tanah hutan yang dikelola. Desa Sidodadi Dusun Mandiku adalah Desa yang mempunyai kawasan hutan yang aktif di kelola masyarakat. Masyarakat Desa Sidodadi membuat organisasi yaitu Gabungan Kelompok Tani Hutan guna untuk mengelola hutan dengan terstruktur, berprinsip, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan guna untuk kelangsungan hidup masyarakat.

¹⁹ Dr. Warsito Utomo, dalam jurnal “substensi pengelolaan lingkungan sumber daya hutan”, 2018

²⁰ Dr. Endang Sri Rejeki, MS, “Karakteristik masyarakat desa pinggir hutan”, 6.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan mengenai deskripsi urutan dari pembahasan skripsi. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdapat dari beberapa sub bab dalam penelitian skripsi yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan dan teori yang digunakan, dalam bab ini juga mendeskripsikan perbedaan dan persamaan dari penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pembahasan pada bagian ini adalah tentang metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data kemudian tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi gambaran objek yang diteliti, penyajian data yang didapatkan dari hasil wawancara lapangan dan telah dianalisis data berdasarkan teori yang digunakan dan penemuan data

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan mendeskripsikan temuan dan hasil dalam penelitian. Saran memberikan masukan kepada objek yang diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau membahas banyak penelitian terdahulu dengan topik yang sama sebagai alat perbandingan dan tinjauan pustaka. Hal ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis akurat dan lengkap. Setelah memasukkan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pekerjaan yang telah dilakukannya, peneliti terlebih dahulu merangkum penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan di bagian ini.

Tahapan ini membantu kita untuk melihat validitas dan keadaan penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan penelitian asli ini untuk mempromosikan karya sebelumnya. Judul penelitian ini adalah: “Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” bukanlah yang pertama kali. Di masa lalu, penelitian dengan tema serupa telah dilakukan dalam hal ini, termasuk penelitian berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasna Mutiara Ayu Fauzia, penelitian skripsi dengan judul “Resistensi Masyarakat Sekitar Hutan”, dari Universitas Brawijaya Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, pada tahun 2018²¹. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pembahasan dari peneliti ini adalah membahas tentang tindakan resistensi

²¹ Hasna Mutiara Ayu Fauzia, “*Resistensi Masyarakat Sekitar Hutan*”, Skripsi Universitas Brawijaya Desember 2018.

masyarakat pinggir hutan kepada penguasa lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan substensi.

Dengan diterapkannya program PHBM Perhutani yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat marginal hutan dan menurunkan tingkat pembalakan liar, resistensi masyarakat semakin terlihat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola kekuasaan, eksploitasi, dan perlawanan yang terjadi antara masyarakat dan Perhutani dalam upaya mempertahankan.

Dalam perbedaan penelitian yang ada pada skripsi berjudul “Resistensi Masyarakat Sekitar Hutan” adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada tindakan perlawanan yang dilakukan masyarakat pada Perhutani dengan melakukan illegal logging saat malam hari, mengubur kayu hasil illegal logging, mempertahankan lahan yang tidak memiliki surat perintah serta menyuap oknum Perhutani. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini dilakukan pada kawasan hutan dengan jenis tanaman kayu. Kesamaan dari penelitian ini adalah pembahasannya sama-sama tentang perlawanan masyarakat pinggir hutan kepada pihak Perhutani.

2. Berdasarkan penelitian oleh Abu Rokhmad dalam jurnal yang berjudul “Petani vs Negara Studi Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqih” pada tahun 2018 . Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya perselisihan antara

masyarakat dan Perhutani, pembalakan liar merugikan kantor Perhutani dan kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak dalam perselisihan ini²².

Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana penyelesaian konflik ini berujung damai, pendekatan non-yudisial dilakukan untuk menyelesaikan sengketa lahan hutan. Untuk mencapai solusi tersebut, MDH menerapkan strategi kerjasama dan komunikasi dengan pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama, demonstrasi, perlawanan, negosiasi, dan mediasi dengan Perm Perhutani. Hasil akhir dari negosiasi dan refleksi adalah kerjasama dalam program-program seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hal tersebut yang membuat pembeda dengan penelitian sebelumnya, adapun persamaan penelitian yaitu penelitian ini sama membahas tentang adanya perlawanan karena permasalahan masyarakat dengan Perhutani untuk mengelola hutan.

3. Berdasarkan penelitian oleh Syafrudin dalam jurnal yang berjudul “Gerakan Perlawanan atas Penguasaan Sumber Daya Hutan Masyarakat Adat Mentawai di Pulau Siberut” Universitas Negeri Jakarta, Indonesia²³.

Penelitian ini membahas bagaimana perkembangan aktor perlawanan dari gerakan perlawanan atas penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada gerakan perlawanan pada konflik atas

²² Abu Rokhmad, “Petani vs Negara Studi Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif *Fiqih*” (Jurnal Edudeena Vol. 1 No. 2 Juli 2018)

²³ Syafrudin, “Gerakan Perlawanan atas Penguasaan Sumber Daya Hutan Masyarakat Adat” (Jurnal Vol.21 No.1 Oktober 2021)

penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat dengan mengukur solidaritas masyarakat untuk membentuk sebuah gerakan perlawanan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa resistensi tidak terlalu spesifik dikarenakan kelompok masyarakat yang terbangun kurang adanya solidaritas dan rasa memiliki atas hutan adat karena keberagaman yang ada pada siberut. Perbedaan peneliti dengan peniliti yang berfokus pada ketidaksinkronan kebijakan yang dibuat kepada kedua belah pihak. Adapun persamaan yang dilakukan peniliti adalah penelitian yang membahas tentang adanya resistensi masyarakat dengan penguasa lahan hutan.

4. Berdasarkan penelitian oleh Doktor Antropologi Ekologi dalam jurnal yang berjudul “Strategi Perlawanan Berkedok Kolaborasi Sebuah Tinjauan Antropologi Kasus Penguasaan Hutan” Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering, Politeknik Pertanian Negeri Kupang²⁴. Kajian ini membahas tentang realitas empiris praktik penguasaan lahan hutan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai pelaku hutan.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan didasarkan pada kedekatan geografis, aspek sejarah, misi politik dan sosial, serta klaim terhadap otoritas. Alasan inilah yang mendorong para pemangku kepentingan untuk menerapkan strategi dan taktik pengelolaan hutan. Fenomena seperti itu bisa membentuk hubungan resistensi, konflik, dan kolaborasi. Analisis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

²⁴ Doktor Antropologi Ekologi, “Strategi Perlawanan Berkedok Kolaborasi Sebuah Tinjauan Antropologi Kasus Penguasaan Hutan” (Jurnal Partner Tahun 2018 Nomor 2)

Perbedaan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada strategi perlawanan untuk penguasaan lahan hutan demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan bagaimana masyarakat melakukan kolaborasi sambil menjalankan taktik menguasai hutan. Adapun persamaan dari peneliti yaitu sama membahas tentang perlawanan masyarakat terhadap penguasa lahan hutan untuk mengambil hak-haknya demi kepentingan masyarakat.

5. Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Yusuf dalam jurnal “Resistensi Atas Kebijakan Pengelola Hutan (Studi pada Masyarakat Orang Rimba di Provinsi Jambi)” IAIN STS Jambi dan Zuly Qodir, Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta²⁵.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kenapa kelompok resistensi masyarakat adat terus menentang kebijakan TNDB dan respon TNDB sebagai wakil pemerintah adat. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan etnografi. Temuan peneliti ini alasan masih berlanjutnya perlawanan Adat masih terus karena ada kekecewaan dalam kebijakan TNDB yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, kerjasama dan pengaruh dari luar, peningkatan biaya hidup membuat pasukan adat untuk mengambil resiko baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup.

Perbedaan dari penelitian ini adalah masyarakat melakukan bentuk perlawanan pada kawasan hutan taman nasional yang termasuk ke dalam

²⁵ Muhammad Yusuf, Zuly Qodir, “Resistensi Atas Kebijakan Pengelola Hutan” (Jurnal Vol. 1 No. 2 Juni 2018)

jenis hutan konservasi kawasan pelestarian alam, berbeda dengan peneliti dan peneliti yang membahas perlawanan masyarakat pada kawasan hutan kemitraan. Adapun kesamaan dari kajian ini yaitu membahas mengenai penentangan kebijakan dari penguasa lahan hutan.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alifia Imananda Putri dalam jurnal “Resolusi Konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember” Fakultas Keamanan Nasional UNHAN²⁶.

Penelitian ini berfokus mengenai usaha penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendekatan meditasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori konflik Bartos dan Wehr mengenai penyebab konflik yaitu keterbatasan sumber daya, perbedaan peran dan nilai, atau perbedaan kepentingan.

Temuan dari peneliti ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah Mandiku Sidodadi belum berhasil. Program reformasi pertanahan kemudian dapat menjadi solusi penyelesaian konflik jangka panjang yang didukung oleh pemerintah daerah, dan tim dapat dibentuk untuk melibatkan masyarakat lokal dalam upaya penyelesaian konflik.. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti lebih memfokuskan pada penyelesaian konflik antara masyarakat dan Perhutani, persamaan dari peneliti yaitu sama membahas tentang

²⁶ Alifia Imananda Putri, “Resolusi Konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember” (Jurnal Vol. 6 No. 3 2020)

problem masyarakat dan Perhutani yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanahnya.

Tabel 2.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Tahun, dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
01	Hasna Mutiara Ayu Fauzia, 2018, Universitas Brawijaya	Studi Resistensi Masyarakat Sekitar Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Kualitatif 2. Studi Resistensi 3. Mempertahankan Kebutuhan Subsistensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Bentuk Perlawanan 3. Kawasan Hutan
02	Abu Rokhmad, 2018	Negara vs Petani Studi Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik Tanah Hutan 2. Hutan Kemitraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Strategi penyelesaian konflik damai
03	Syafrudin, 2021, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia.	Gerakan Perlawanan atas Penguasaan Sumber Daya Hutan Masyarakat Adat Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Kualitatif 2. Gerakan Perlawanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Kawasan Hutan
04	Doktor Antropologi Ekologi,	Strategi Perlawanan Berkedok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Kualitatif 2. Perlawanan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Strategi Penguasaan Lahan

	2018, Politeknik Pertanian Negeri Kupang.	Kolaborasi Sebuah Tinjauan Antropolog i Kasus Penguasaan Hutan		
05	Muhammad Yusuf, Zuly Qodir, 2018, IAIN STS, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.	Resistensi Atas Kebijakan Pengelola Hutan (Studi pada Masyarakat Orang Rimba di Provinsi Jambi	1. Metode Kualitatif 2. Melawan Kebijakan	1. Lokasi Penelitian 2. Kawasan Hutan
06	Alifia Imananda Putri, 2020, Fakultas Keamanan Nasional UNHAN	Resolusi Konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember	1. Lokasi Penelitian 2. Metode Penelitian 3. Kawasan Hutan 4. Perlawanan	1. Permasalahan konflik 2. Lebih berfokus pada upaya penyelesaian konflik

Terdapat kesamaan dan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dan berbagai bentuk penelitian yang telah dilakukan. Dari persamaan yang telah dilakukan peneliti adalah membahas tentang perlawanan yang muncul dari adanya permasalahan perhutanan social yang terjadi pada masyarakat pinggir hutan, karena ada berbagai faktor pemicu yang menimbulkan resistensi itu muncul, mulai dari kebijakan yang dibuat, peralihan kawasan hutan yang merugikan masyarakat, terdapat pencurian kayu milik tanah Negara dan pembentukan peraturan baru yang menghapus hukum adat yang dibuat masyarakat. Terdapat pula perbedaan

dalam penelitian terdahulu yaitu terdapat pada bentuk-bentuk perlawanan dan strategi perlawanan yang dilakukan masyarakat, dengan tujuan untuk menyelamatkan kesejahteraan masyarakat guna untuk kepentingan yang berkelanjutan.

B. Kajian Teori

Pembahasan teori yang menjadi patokan dalam melakukan penelitian terdapat pada bagian ini. Pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan penekanan dan tujuan penelitian akan lebih ditingkatkan dengan pembahasan teori yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Pendirian teori dalam penelitian kualitatif diposisikan sebagai alat atau cara pandang analisis, bukan sebagai sesuatu yang ingin diuji, berbeda dengan penelitian kuantitatif.

1. Studi resistensi

a. Konsep Resistensi

Perlawanan petani merupakan istilah baru dalam konsep sosiologi yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana petani berusaha bertahan dari tekanan yang terus-menerus menindas mereka. Dalam hal ini, konsep perlawanan terhadap tekanan secara tidak langsung, berarti bahwa kaum tani menunjukkan perlawanan terhadap apapun yang menekannya. Selanjutnya konsep resistensi selalu dipergunakan untuk menggambarkan terjadinya resistensi petani.²⁷

²⁷ Hary Yuswadi, *Pola Resistensi : Variasi dan Struktur Resistensi Petani di Pedesaan*, (Jember : Media Cipta Perkasa, 2022), 1.

Fenomena perlawanan petani sering kali dianggap sebagai sesuatu yang jarang terdengar oleh sebagian masyarakat. Hal itu disebabkan karena adanya pandangan bahwa sebagian besar petani merupakan orang yang tidak terdidik, pandangan lain menganggap bahwa petani merupakan figur yang penurut dan sering kali menghabiskan waktunya di ladang. Sebagian besar petani di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sering digambarkan sebagai kelas menengah ke bawah, dan seringkali bekerja di bawah tekanan struktur sosial yang lebih tinggi.

Scott menggambarkan perubahan hubungan antara petani kaya dan miskin sebagai akibat dari Revolusi Hijau, dimana petani kaya menjadi semakin kaya dan petani miskin menjadi semakin miskin. Dalam hal ini, penguasaan orang kaya dan hegemoni negara, Scott memandang ketidaksetaraan inilah yang memunculkan resistensi-resistensi kultural. Selanjutnya Scott melihat kaum tani lemah mempunyai senjata dalam melakukan perlawanannya terhadap kaum kaya dan hegemoni Negara²⁸. Senjata yang digunakan kaum lemah ini merupakan fenomena kultural, seperti menghambat, berpura-pura menurut, mencuri, memfitnah, pembakaran dan sabotase.

Scott juga menerangkan bahwa meskipun kelas elit dapat mengontrol sikap orang miskin, tetapi kaum elit tidak dapat menguasai pikirannya. Para petani miskin menyadari bahwa mereka telah

²⁸ Hary Yuswadi, *Pola Resistensi : Variasi dan Struktur Resistensi Petani di Pedesaan*, (Jember : Media Cipta Perkasa, 2022), 19.

melakukan pencurian dan menipu para elit, dan bahwa apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah melemahkan tingkat kepercayaan mereka dan membatasi interpretasi mereka yang terbatas terhadap kehidupan mereka. Fakta ini dapat dimaknai sebagai dominasi pada tataran ideologis. Dalam terminologi Gramsci, hal ini disebut hegemoni..

Scott menjelaskan perbedaan antara resistensi sungguh-sungguh dengan perlawanan yang bersifat sementara. Ciri-ciri kegiatan yang bersifat incidental adalah tidak terorganisasi, tidak sistematis dan individual. Perlawanan yang sungguh-sungguh memiliki ciri khas sebagai berikut :

- 1) Sistematis, Terstruktur, Terorganisasi, kooperatif dan terencana
- 2) Berprinsip
- 3) Mempunyai akibat-akibat menuju perubahan yang baik
- 4) Mengandung tujuan dan gagasan yang meniadakan dasar dari dominasi

b. Etika Subsisten

Etika bertahan hidup dicapai dengan mengedepankan prinsip pertama: keselamatan. Istilah tersebut berasal dari James Roumasset sehubungan dengan Revolusi Hijau. Konsep pengutamaan keselamatan adalah adanya batasan pemahaman seputar kriteria kelangsungan hidup yaitu menghindari risiko karena dapat menimbulkan bencana, di luar

itu berlaku perhitungan keuntungan yang lebih borjuis. Prinsip kedua adalah menghindari resiko.²⁹

Scot menerangkan mengenai penghindaran risiko ini menjelaskan mengapa petani lebih memilih menanam tanaman subsisten dibandingkan tanaman non-pangan yang produknya dijual. Penghindaran resiko atau kegagalan yang akan membahayakan masa depan petani merupakan suatu ciri khas yang menonjol dalam diri petani. Dari hal tersebut, pada umumnya petani lebih memilih tanaman yang kemungkinan kecil risikonya . Prinsip itu sejalan dengan prinsip yang diterapkan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku yaitu berfokus pada mengelola tanaman sesuai kebutuhan hidupnya untuk stok bahan pangan.

c. Konsep Eksploitasi

Eksploitasi diartikan sebagai bentuk tekanan yang menyesakkan dari pemerintah yang tidak adil terhadap petani asumsi dari James Scot. Sebenarnya tugas Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang wakikan oleh Perhutani tidak terlaksana secara optimal dan justru menimbulkan ketidakadilan³⁰. Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat selama ini hampir diberbagai kawasan hutan yang dikelola masyarakat adalah sistem bagi hasil 10% yang dilakukan oleh Perhutani. Hal itu dilakukan Perhutani menyama ratakan jumlah pajak pada masyarakat yang bertani di dalam

²⁹ Hasna Mutiara Ayu Fauzia, “Resistensi Masyarakat Sekitar Hutan”,(Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), 20.

³⁰ Hasna Mutiara Ayu Fauzia, 22.

hutan, kesalahannya adalah tidak melakukan survey terlebih dulu untuk setiap luas lahan dan hasil panen masyarakat.

Karena masyarakat mempunyai lahan di dalam hutan dengan luas berbeda-beda dan hasil panen juga berbeda, tergantung dari iklim dan tanah yang dikelola, ditambah juga pupuk semakin mahal harganya dan sulit untuk mendapatkan pupuk buat merawat tanaman di dalam hutan, pernyataan tersebut sangat mempengaruhi hasil panen masyarakat yang cenderung naik turun pendapatannya. Sehingga dari problem tersebut sering munculnya masalah antara masyarakat dengan pihak Perhutani atas dasar ketidakadilan.

d. Bentuk perlawanan

Bentuk perlawanan petani hutan dalam kesehariannya sebenarnya adalah dilakukan oleh kelompok yang terdominasi yang melakukan perlawanannya tidak bertujuan untuk mendominasi sehingga perlawanan tidak perlu diarahkan pada sumber langsung perampasan. Karena menurut Scoot masyarakat melakukan perlawanan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, tanah dan pendapatan yang menjadi tujuan utamanya, masyarakat petani hutan melakukannya dalam keadaan yang relative aman, maka mereka dapat hanya mengikuti garis perlawanan yang paling lunak.

Bentuk Resistensi Menurut James Scott bentuk resistensi terbagi menjadi dua antara lain resistensi tertutup dan resistensi terbuka. Perlawanan terbuka yang dimaksud adalah adanya interaksi

terbuka dengan kelas subordinat dengan superordinat. Sedangkan perlawanan tertutup adanya interaksi tertutup dan tidak langsung kepada kelas subordinat. Dua bentuk yang dimaksud yaitu :

- 1) Resistensi terbuka : melakukan protes sosial atau demonstrasi, merupakan bentuk perlawanan sistematis, terorganisasi, dan berprinsip.
- 2) Resistensi tertutup : ideologis atau simbolis, adalah penolakan terhadap kategori yang dipaksakan ke masyarakat. Misalnya gosip, fitnah, atau penarikan kembali rasa hormat kepada penguasa.

Dari bentuk perlawanan tertutup dan terbuka yaitu bentuk-bentuk perlawanan yang terjadi di Desa Sidodadi Dusun Mandiku merupakan suatu perlawanan terbuka dan tertutup. Perlawanan terbuka dilakukan oleh masyarakat yang intelektual, mempunyai kekuasaan dan berprinsip untuk berani membela masyarakat dalam mempertahankan kebijakannya. Sedangkan perlawanan tertutup dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu melakukan perlawanan terbuka atau masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan dengan notabane masyarakat yang mudah ditindas oleh orang luar.

2. Perhutanan Sosial

Sejak awal pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla, muncul kebijakan pemerintah yang memberikan perlakuan istimewa terhadap masyarakat kelas bawah yang tinggal di sekitar atau di kawasan hutan. Kebijakan ini untuk melaksanakan program perhutanan sosial (PS) bagi

masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial P.83 Tahun 2016. Dengan diterapkan perluasan dan percepatan PS dari Pemerintah, mendapatkan respon yang bermacam dari berbagai pihak utamanya dari pegiat PS dari kalangan LSM yang bergelut dengan isu PS sampai saat ini. Sebagian besar pegiat PS dari LSM menyambut baik dan penuh rasa optimis 12,7 juta ha PS dapat dicapai hingga akhir 2019.³¹ Namun dari diterapkannya kebijakan PS ini, terdapat pula permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan, yang berkonflik dengan penguasa lahan hutan akibat dari perbedaan kepentingan tertentu, jadi membuat terlahirnya perlawanan kaum petani hutan dengan pihak penguasa lahan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat Peraturan sosial kehutanan dengan No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial Republik Indonesia, bahwa bertujuan sebagai mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan dalam pengelolaan/penggunaan kawasan hutan, dibutuhkan kegiatan perhutanan sosial yang berupaya menjamin akses hukum masyarakat lokal dalam bentuk pengelolaan hutan desa (HD), izin usaha hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat adat untuk kesejahteraan

³¹ Mohammad Djauhari, "Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin", (Bogor: Konsorium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan, 2017).

masyarakat dan konservasi sumber daya hutan, pemerintah menerbitkan Peraturan Sosial Kehutanan terbaru sebagai perintah menteri³².

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan masyarakat atau adat setempat sebagai pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan hidup, dan dinamika sosial budaya pada kawasan hutan nasional atau hutan hak/adat berupa hutan desa, hutan rakyat, tanaman rakyat, Hutan Adat dan Hutan Kemitraan. Adapun lima skema Perhutanan Sosial adalah:

- a. Hutan Desa merupakan hutan milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk masyarakat setempat dalam mensejahterakan masyarakat.
- b. Hutan Kemasyarakatan atau HKm adalah hutan dengan program untuk memberdayakan masyarakat yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat atau HTR merupakan hutan yang berada pada kawasan hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Kemitraan merupakan pengelolaan hutan dengan sistem Kerjasama antara masyarakat dengan Perhutani guna untuk mendapatkan keuntungan bersama dalam pengelolaan hutan.

³² Mohammad Djauhari, 6.

- e. Hutan Adat merupakan hutan yang berada dikawasan adat masyarakat lokal.

Tujuan dari di turunkannya kebijakan ini merupakan upaya pembukuan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan, kerjasama, perizinan dan pengakuan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan dengan memanfaatkan prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipasi dan akuntabilitas.

Dampak dari kebijakan tersebut, selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla, yakni November 2014 hingga November 2017, dilakukan kegiatan pemberian akses pengelolaan hutan di lahan seluas 604.373 hektare. Terminologi Joko Widodo-Yusuf Kalla Total produksi perhutanan sosial mencapai 1,05 juta hektar, dibandingkan hanya 449.104 hektar dalam tujuh tahun terakhir pada pemerintahan sebelumnya.

Presiden Joko Widodo telah menyediakan 12,7 juta hektar untuk praktik perhutanan sosial. Berdasarkan tujuan Peta Indikator Kawasan Perhutanan Sosial (PIAPS), total luas hutan yang diperuntukkan bagi perhutanan sosial adalah sekitar 13,5 juta hektar. Artinya potensi pemanfaatan PIAPS hanya 7,8%..³³

³³ Herman Supriyanto ,”*Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin*”,(Bogor: Konsorium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan,2017). 7.

3. Solidaritas

Kesolidaritan masyarakat perlu untuk di tumbuhkan pada realita kehidupan guna untuk membangun kerjasama yang erat dan mencapai tujuan bersama. Seperti halnya pada Masyarakat petani hutan di Desa Sidodadi menumbuhkan solidaritas guna untuk tetap mempertahankan hak kelola tanahnya sebagai keberlangsungan hidup mereka.

Menurut Emile Durkheim solidaritas merujuk pada ikatan dan persatuan anggota Masyarakat, solidaritas merupakan arti sebuah kesetiaan antar satu golongan ke golongan yang lain, memiliki arti saling mempunyai kepercayaan yang tinggi dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Emile Durkheim membagi dua pengertian solidaritas merupakan solidaritas mekanis yang berarti didasari oleh nilai dan kepercayaan bersama, dan solidaritas organik yang berarti didasarkan pada saling ketergantungan dan pembagian kerja³⁴. Solidaritas masyarakat adalah kunci untuk melahirkan proses hubungan masyarakat individu menjadi satu kesatuan yang jelas dalam masyarakat.

³⁴ Teori solidaritas, dalam link <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/64c7c0be08a8b5417c0abea2/teori-sosiologi-emile-durkheim-memahami-solidaritas-sosial-dan-integrasi-masyarakat>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Anselm Staruss dan Juliet Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitiannya yang tidak berdasarkan dengan hitungan³⁵. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mempunyai tujuan untuk menggali dan menganalisis tentang resistensi masyarakat pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kabupaten Jember melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

Untuk jenis penelitian yang dipilih menggunakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah mendeskripsikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Terminologi yang digunakan bermakna dan deskriptif; tujuannya adalah untuk memberikan gambaran rinci dan akurat tentang suatu masalah tertentu³⁶. Hal ini selaras dengan tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan atau mengkaji mengenai perlawanan masyarakat pinggir hutan yang terjadi di Desa Sidodadi Dusun Mandiku tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu gambaran dengan objek penelitian yang akan diteliti beserta dengan permasalahan yang ada. Lokasi penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena didalamnya dijadikan untuk pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian. Peraturan lokasi

³⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. 17.

³⁶ Muhammad Ramdhan, "*Metode Penelitian*" (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) 7-8.

tersebut terdapat berdasarkan karakteristik permasalahan yang ada pada lokasi tersebut, didukung oleh kondisi geografis, budaya, dan sosiologi daerah tersebut.³⁷

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan mempunyai perbedaan dengan permasalahan ditempat lain, maka lokasi penelitian dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Penetapan lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada kerangka teoritis, tetapi juga pada aspek operasional. Oleh karena itu, lokasi penelitian dievaluasi berdasarkan apakah dapat diakses atau dapat dieksplorasi lebih lanjut. Hal tersebut penting karena semenarik apapun suatu kasus, jika sulit bagi peneliti untuk mengkajinya, maka percuma saja. Penting juga untuk memeriksa apakah lokasi penelitian menawarkan peluang studi yang menguntungkan³⁸.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Sidodadi adalah wilayah tersebut termasuk wilayah perhutanan sosial yang dimana untuk memberdayakan masyarakat pinggir hutan, masyarakat terlibat aktif dalam mengelola hutan sebagai pekerjaan masyarakat. Masyarakat di Desa Sidodadi beraktifitas sebagai petani hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mempunyai keterikatan tersendiri yang bergantung pada alam. Lokasi perhutanan ini termasuk skema hutan kemitraan, namun ada rencana perubahan skema hutan menjadi hutan kelola masyarakat karena ada

³⁷ Masruroh, "Upaya Pengembangan Sikap Sosial Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Malang," (Skripsi, UIN Malang, 2017), 41.

³⁸ Burhan Bungin, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 147-148.

ketidaksinkronan kebijakan penanaman yang dibuat masyarakat dan pihak Perhutani. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang studi resistensi masyarakat pinggir hutan di Desa Sidodadi.



Gambar 3.1
Peta Desa Sidodadi

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dibuat berdasarkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dan diperoleh dari informan, namun sarannya tentu saja adalah keadaan sosial masyarakat setempat, khususnya petani pedesaan dan hutan didesa Sidodadi, masyarakat yang memahami sumber daya alam dan manusia.

Kehidupan sehari-hari mereka melibatkan aktivitas seperti mengelola hutan sebagai lahan pertanian. Studi IPS dilakukan dengan sengaja, dengan berbagai perspektif dalam data yang dikumpulkan dari partisipan yang dianggap memiliki pengetahuan dan sadar akan isu-isu yang ada di lokasi studi³⁹. Berikut beberapa subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini:

³⁹ Lexy J Moleong, *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 300.

1. Anggota komunitas gabungan kelompok tani hutan (GAPOKTANHUT) di Desa Sidodadi

Informasi dan keterangan dari pendiri dan pengurus Gabungan kelompok tani hutan akan membantu peneliti dalam mencari data tentang dinamika pengelolaan hutan di daerah tersebut dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat untuk menggarap tanah milik Negara di Desa Sidodadi, penggalan informasi dilakukan dengan pengamatan secara mendalam terhadap keseharian dan aktivitas kepengurusan hutan yang keterlibatan aktif dalam menggarap tanah hutan untuk lahan pertanian. adapun informan yang dipilih adalah:

Tabel 3.1
Data Informan

Nama	Status
Pak Suroso	Ketua Gapoktanhut
Pak Jaelani	Bendahara Gapoktanhut
Pak Supriyanto	Sekretaris
Pak Martoyo	Anggota Gapoktanhut
Pak Purwadi	Anggota Gapoktanhut
Pak Taufik	Anggota Gapoktanhut

2. Masyarakat Desa Sidodadi Dusun Mandiku

Masyarakat pinggir hutan menjadi bagian yang penting untuk menggali informasi terkait dinamika permasalahan yang terjadi dari awal permasalahan tanah produksi yang dilakukan perhutani kepada masyarakat, sehingga terjadi konflik agraria dan muncul isu tentang permasalahan perbedaan kebijakan mengelola hutan dalam wilayah

Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada informan, dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan terstruktur, agar penggalian informasi selama proses wawancara dapat mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto observasi adalah suatu pengamatan yang kuat terhadap fenomena tertentu dengan menggunakan penglihatan dalam prosesnya, pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas yang berlangsung⁴¹.

Penjelasan diatas merupakan cara peneliti untuk mengamati mengenai penggarapan lahan hutan sebagai pertanian masyarakat, mulai dari jenis-jenis tanaman, penataan ruang pertanian dan kondisi wilayah hutan daerah Desa Sidodadi Dusun Mandiku.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi dapat diartikan sebagai pelengkap untuk melakukan penelitian selain dari wawancara dan dokumentasi. Pada teknik ini terdapat dalam bentuk-bentuk dokumentasi seperti video, gambar dan rekaman suara. Untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan⁴².

Peneliti juga melakukan dikumentai mengenai kondisi wilayah hutan yang digarap masyarakat, kondisi wilayah hutan yang digarap perhutani, jenis tanaman hutan yang digarap masyarakat, foto bersama

⁴¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018) 145.

⁴² Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) 243

informan yang termasuk dalam proses penggalian data mengenai penelitian yang dilakukan.

E. Analisis Data

Bagian yang terpenting pada hasil pengumpulan data yaitu berada pada Analisis data. Dalam analisis data mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk menyajikan hasil karya ilmiah⁴³. Sugiyono, Huberman dan Milles mengartikan bahwa dalam proses menganalisis penelitian kualitatif akan terus digunakan sampai penelitian selesai⁴⁴. Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah rangkuman data yang diperoleh dari lapangan dengan melihat faktor-faktor yang menjadi bahan utama dalam sebuah fenomena⁴⁵. Dengan itu, melalui proses reduksi data, peneliti dapat menjelaskan data dengan jelas dan membantu peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data (data reduction) pengurangan data yang terjadi di lapangan tentu saja cukup besar dan karenanya harus dicatat dengan jelas.

Waktu dapat menentukan peneliti memperoleh banyak data yang relevan. Untuk melakukan ini, kita perlu mengurangi data. Reduksi data mempunyai arti peringkasan, memilih informasi yang tepat, mencari sumber pokok sesuai dengan tema yang diteliti. Melalui proses tersebut, Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan

⁴³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 119.

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 246.

⁴⁵ Sugiyono, 247.

peneliti dalam mengumpulkan informasi dan mencari informasi tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*), peneliti mengkategorikan dan memilih data sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian menjelaskan data yang disesuaikan. Dari penjelasan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan data secara jelas dengan permasalahan yang didapat. Dalam hal ini, perolehan data bisa dijadikan sebagai bahan dalam mendeskripsikan problem penelitian yang di angkat. Penyajian data dapat diartikan sebagai penjelasan secara umum dari perolehan data yang didapat ketika proses wawancara. Penyajian data dapat dilakukan dengan menjelaskan uraian secara singkat dengan penyajian data ini dapat memudahkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

3. Pengujian dan penarikan kesimpulan

Kesimpulan ini adalah suatu upaya dalam menjelaskan informasi dan data yang diperoleh untuk memahami dari penelitian yang dilakukan⁴⁶. Kesimpulan yang dilakukan untuk menjawab dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penarikan kesimpulan ini harus sesuai dengan apa yang menjadi fokus, agar penarikan kesimpulan dapat memperoleh hasil yang jelas.

⁴⁶Umar Sidiq, *Metodologi Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 50.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Umar Sidiq menjelaskan, apabila data yang diperoleh peneliti dapat diverifikasi, dapat ditinjau keabsahannya, maka harus digunakan teknik keabsahan data.⁴⁷ Untuk mencapai kejelasan data. Maka, peneliti menggunakan triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono, triangulasi teknik adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan sumber yang serupa tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal tersebut, peneliti melakukan perbandingan data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara dan observasi, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan asumsi dari hasil penelitian.

2. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono, triangulasi dijelaskan sebagai upaya untuk menggali data dengan berbagai sumber yang berbeda dalam fenomena yang terjadi. Hal tersebut peneliti melakukan triangulasi untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat perlawanan itu terjadi, jenis tanaman apa yang digarap, kebijakan apa yang dibuat guna untuk memberdayakan masyarakat dalam waktu jangka panjang, isu permasalahan apa yang terjadi, bentuk perlawanan seperti apa yang dilakukan dan pengelolaan hutan yang selama ini diterapkan masyarakat di Desa Sidodadi Dusun Mandiku.

⁴⁷ Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2022). 194.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah pengumpulan dari awal melakukan penelitian hingga selesai melakukan penelitian. Adapun tahap-tahapan penyelesaian hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan awal untuk mengetahui gambaran lokasi penelitian, objek penelitian, subyek penelitian, fokus penelitian dan mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan penelitian ketika turun ke lapangan. Pada penelitian ini memilih lokasi di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kabupaten Jember dengan objek yaitu resistensi masyarakat petani hutan dan subyek dari Gabungan Kelompok Tani Hutan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan ini adalah proses ketika melakukan penelitian secara langsung dengan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang digali. Dalam tahapan ini peneliti bisa mengetahui siapa yang dijadikan subjek penelitian dan objek penelitian untuk mempermudah penggalian data yang diperoleh.

3. Tahap Penyelesaian

Data yang diperoleh peneliti dapat dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam Buku Panduan Penulisan Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember Tahun 2022. Ini adalah tahap terakhir yang diselesaikan setelah semua data diverifikasi validitasnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Sidodadi

Setiap daerah mempunyai aset yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlangsungan hidup mereka, pada awal mulanya nenek moyang masyarakat desa sidodadi memabat alas pada pemerintahan belanda yang status kepemilikan tanah bukan milik pribadi yakni kepemilikan tanah negara, pada waktu itu nenek moyang masyarakat desa sidodadi memilih menetap di daerah hutan yang berada di arah selatan Kabupaten Jember dan pada akhirnya bertahan sampai saat ini. Desa Sidodadi berdiri pada tahun 1927, merupakan pecahan dari Desa Andongsari Kecamatan Ambulu. Sebelum terbentuk sebelumnya adalah hutan yang dihidupi oleh beberapa kepala keluarga. Umumnya mereka adalah pendatang yang berasal dari Kabupaten Madiun, Ponorogo, Blitar dan Kediri. Desa sidodadi berada ditepat arah selatan dari Ibu kota Kecamatan Tempurejo dengan jarak +9 km, dan jarak dengan Ibu kota Kabupaten + 30 km. Luas wilayah seluruhnya adalah 2645, 377 Ha (26, 453).⁴⁸

Desa Sidodadi memiliki kawasan hutan Desa yang masi aktif dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, realita umumnya keadaan kehidupan masyarakat Desa Sidodadi merupakan masyarakat

⁴⁸ Desa Sidodi, wordpress dalam link <https://sidodadijember.wordpress.com/>

yang mayoritas petani dan peternak. Keadaan kehidupan masyarakat Sidodadi tidak terlepas dari adat istiadat peninggalan nenek moyang yang dilestarikan sampai saat ini yaitu beranggapan bahwa tanah memiliki harga diri yang sangat tinggi yang harus dijaga dan dirawat. Adat istiadat masyarakat Desa Sidodadi terdiri dari Adat Jawa dan Adat Madura. Desa Sidodadi terbagi menjadi tiga Dusun antara lain :

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Mandiku
- c. Dusun Jatirejo.

Wilayah Desa Kedungrejo terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Krajan, Mandiku dan Jatirejo. Kedudukan kepala Dusun sangat strategis dalam memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Desa Sidodadi karena mempunyai banyak tanggung jawab desa di pembagian wilayah. Ketiga permukiman tersebut terbagi enam RW dan 18 RT. Keberadaan Rukun Tetanga (RT) sebagai bagian dari kesatuan pemerintahan Desa Sidodadi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjaga kepentingan masyarakat setempat, terutama dalam kaitannya dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

Adapun batas wilayah Desa Sidodadi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pondokrejo - Jatimulyo
- b. Sebelah Timur : Desa Pondokrejo - Curahtakir
- c. Sebelah Selatan : Desa Andongsari - Wonosari
- d. Sebelah Barat : Desa Pontang



Gambar 4.1
kawasan hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku

2. Profil GAPOKTANHUT Sidomukti

Gapoktanhut Sidomukti adalah Gabungan Kelompok Tani Hutan yang berada di Desa Sidodadi Dusun Mandiku. Gapoktanhut berdiri pada tahun 2019 dan sudah diresmikan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Sebelum berdirinya Gapoktanhut pada saat itu masih berbentuk LMDH, akan tetapi dilakukan perombakan struktur organisasi dikarenakan organisasi sebelumnya tidak aktif dan kurang menjadi wadah masyarakat untuk pengelolaan penanaman pada skema hutan. Dengan perombakan struktur organisasi dan nama organisasi menjadi Gapoktanhut saat ini menjadikan organisasi ini aktif dan memberikan informasi mengenai penanaman kepada masyarakat, sebelumnya banyak masyarakat yang belum paham tentang pengelolaan hutan dikawasan hutan mandiku.

Gapoktanhut mengusung skema hutan kelola masyarakat dengan luas hutan 743 hektar keseluruhan pada kawasan hutan produksi tetap (HP). Program yang dijalankan dalam Gapoktanhut Sidomukti adalah

sistem penghijauan hutan dengan penanaman pertanian dengan hasil yang mensejahterakan masyarakat pinggir hutan melalui penanaman tergantung kebutuhan masyarakat dengan sistem jangka panjang dan penghijauan hutan. Gapoktanhut berjumlah anggota petani hutan aktif sekitar 921 orang yang ikut serta dalam mengelola hutan. Jenis tanaman pada hutan yang dikelola Gapoktanhut antara lain jambu kristal, cabai, jagung, minyak kayu putih dan bahan pangan yang lainnya. Adapun struktur organisasi Gapoktanhut Sidomukti sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur GAPOKTANHUT
(Sumber : Dokumentasi Gabungan Kelompok Tani Hutan)

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada sub bab ini peneliti melakukan penjelasan mengenai pertanyaan yang berada di rumusan masalah yaitu apa saja faktor yang menyebabkan perlawanan dan bentuk perlawanan yang dilakukan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Perolehan data yang

dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan adalah masyarakat mengalami ketertindasan, kekecewaan, serta keterpurukan tenaga dan harga diri petani, karena bagi petani memikirkan masa depan anak cucunya terjamin dan tercukupi kebutuhan hidupnya itu saja sudah cukup. Dinamika perkembangan permasalahan tanah Mandiku pada awal kasus yaitu tahun 2008 muncul konflik pihak Perhutani mengklaim bahwa tanah mandiku adalah tanah milik Negara dan dipasang patok-patok besar pada waktu itu tanpa ijin ke masyarakat sehingga membuat masyarakat merasa terancam akan tanahnya dirampas dan tempat tinggalnya digusur.

Dengan adanya keputusan yang telah diklaim oleh perhutani membuat Masyarakat mandiku melakukan aksi perlawanan untuk mempertahankan tanahnya, karena sejak dulu masyarakat sudah bertempat tinggal dan sudah peninggalan dari nenek moyangnya yang diturun temurunkan, pada perkembangan permasalahan yang dihadapi Masyarakat mandiku sejak awal munculnya problem 2008 hingga saat ini, pada tahun 2024 kini permasalahan tersebut sudah stabil dan permasalahan konflik tanah sudah tidak serumit pada awal tahun 2008, namun masyarakat sampai saat ini masi tetap waspada akan munculnya permasalahan tanah.

Untuk mendapatkan data yang lebih jelas, peneliti mencari informasi kepada empat subyek yang dijadikan informan yaitu Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dari Gapoktanhut.

“Dulu pada tahun 2008 masyarakat mengalami keresahan akan penggusuran tanah yang diklaim perhutani, hal itu mengancam keberlangsungan hidup kami dan permasalahan itu dengan seiring berjalannya waktu kini sudah sementara aman, pada konflik tanah pada tahun 2008 itu masuk dalam wilayah TORA yaitu Tanah Objek Reforma Agraria yang mengurus tanah bangunan Masyarakat atau pemukiman masyarakat, namun didalam desa Sidodadi terbagi menjadi 2 lembaga yaitu TORA dan PS. Didalam PS ini membentuk Gabungan Kelompok Tani Hutan yang tugasnya difokuskan untuk mengurus lahan pertanian wilayah hutan, pembentukan Gapoktanhut ini didirikan tahun 2019 dengan skema hutan kemitraan dengan perhutani, dalam bermitra antara petani hutan dengan perhutani tergolong tidak lama dikarenakan ketidaksinkronan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan pengelolaan hutan, sehingga melahirkan faktor penentangan terhadap pengelolaan hutan, ditambah citra nama Perhutani tercoreng buruk dimasyarakat Mandiku akibat dari kasus konflik TORA pada 2008 sampai sekarang membekas di benak pikiran masyarakat Mandiku, maka masyarakat petani hutan tidak suka terhadap kebijakan yang diterapkan dalam wilayah Perhutanan sosial oleh perhutani, dikarenakan kebijakan yang dibuat malah menyulitkan petani hutan dan cenderung merugikan petani, dari segi kebijakan penanaman yang meminta untuk ditanam kayu dengan jarak yang terlalu dekat, sehingga petani hutan sulit untuk mengelola tanaman yang ditanam.⁴⁹”

Dari penjelasan diatas oleh ketua Gapoktanhut termasuk dinamika dari permasalahan konflik tanah mandiku. Namun, pada penelitian ini berfokus pada wilayah perhutanan sosial yaitu kawasan hutan untuk lahan pertanian masyarakat. Pada Desa Sidodadi terbagi menjadi 2 kelompok untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak kelola tanahnya yang pertama yaitu TORA dan yang kedua Perhutanan Sosial (PS).

⁴⁹ Suroso, diwawancarai penulis, Jember, 17 maret 2024

Program tersebut di bentuk oleh Pemerintah untuk mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah.

“Faktor perlawanan masyarakat petani hutan di Mandiku tidak hanya pada wilayah TORA saja, namun pada wilayah Perhutanan Sosial (PS) yang terjadi pada tahun 2020, dikarenakan terjadi ketidaksinkronan kebijakan antara Gapoktanhut dan Perhutani dalam mengelola hutan yang didalamnya termasuk hutan kemitraan yang disahkan pada tahun 2019 oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Perbedaan kebijakan dari dua pihak membuat suasana saling memanas untuk menguasai pengelolaan hutan dikawasan Mandiku. Program yang dibuat oleh Gapoktanhut adalah penanaman sesuai kebutuhan substensi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dalam hal perekonomian dan merasakan manfaat dari program Perhutanan Sosial, Dari pihak perhutani meminta untuk penanaman jenis kayu, hal itu membuat kelompok tani hutan merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan akan merugikan masyarakat karena hasil panennya terlalu lama dan cenderung merusak garapan tanaman petani hutan⁵⁰”

Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Gapoktanhut

“Jadi dalam Kawasan hutan produksi tetap ini, ada program perhutanan sosial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bawah, akan tetapi kami bermitra dengan perhutani, dari kemitraan itu kami melakukan sistem bagi hasil dari hasil panen petani, namun dengan sistem mitra yang cenderung merugikan petani ditambah pupuk sulit dan mahal dan kebijakan yang diminta yaitu ditanami kayu, maka semakin sulit bagi petani untuk mengelola hutan yang sudah ditanami dengan jenis tanaman kebutuhan masyarakat, kalau kebijakan itu kami terima akan terjadi perombakan tanaman yang malah merusak tanaman sebelumnya⁵¹”

Diperkuat lagi oleh Bendahara Gabungan Kelompok Tani Hutan

“pengelolaan hutan tentunya kebijakannya harus memberdayakan masyarakat tidak malah membuat sulit petani hutan, Pemerintah membentuk Perhutanan Sosial untuk membantu masyarakat bawah dan meminimalisir angka kemiskinan dan angka pengangguran,

⁵⁰ Jaelani, diwawancarai peneliti, Jember, 19 Maret 2024

⁵¹ Supriyanto, diwawancarai peneliti, Jember, 19 Maret 2024

maka dari kebijakan yang ditawarkan tersebut kami merasa dirugikan dan sulitkan, dari itu Gabungan Kelompok Tani Hutan merubah skema hutan kemitraan menjadi skema hutan hak kelola masyarakat⁵²”

Dari informasi wawancara diatas masyarakat petani hutan memilih sistem pengelolaan hutan sesuai dengan kebutuhan substensi masyarakat. Pada tahun 2023 masyarakat petani hutan berhasil untuk mengubah skema hutan kemitraan menjadi skema hutan kelola masyarakat yang telah disahkan oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2023 dengan nomor SK.5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023. Dengan perjuangan petani hutan dan perlawanan kepada pihak yang merugikan untuk mempertahankan hutan sebagai lahan pertanian masyarakat. Didorong dengan kesolidaritasan petani hutan demi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, dengan program-program pengelolaan hutan sesuai dengan regulasi Pemerintah yaitu memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Maka masyarakat petani hutan melakukan “Gerakan Serentak Perjuangan Petani” untuk melakukan perlawanan dengan tujuan hak kelola hutan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dengan cara perubahan skema hutan.

“Perjuangan perubahan skema hutan tidak gampang untuk diwujudkan dan diterima oleh KHDPK, maka masyarakat petani hutan dan Lembaga Gabungan Kelompok Tani Hutan melakukan pengajuan atas lahan pertanian dengan program yang sesuai yaitu memberdayakan masyarakat dengan mengumpulkan bukti-bukti fisik mengenai jenis penanaman yang menghasilkan masyarakat, penghijauan lahan hutan dengan tanaman kebutuhan masyarakat, meminimalisir kekosongan lahan dan pembagian lahan secara merata kepada masyarakat. Pengajuan oleh Gabungan Kelompok

⁵² Jaelani, diwawancarai penulis, Jember, 24 Maret 2024

Tani Hutan tersebut telah diterima oleh KHDPK pada tahun 2023, namun dengan persyaratan kontrak 35 tahun harus sesuai dengan perencanaan yaitu tidak menjadikan hutan sebagai alih fungsi lahan dan melakukan penanaman secara merata serta tidak merusak hutan, apabila perencanaan tersebut tidak berjalan maka skema hutan kelola masyarakat akan ditarik kembali⁵³”.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris Gabungan Kelompok Tani Hutan

“Perpindahan skema hutan dengan tujuan yaitu memberdayakan masyarakat untuk sepenuhnya mengelola hutan sebagai lahan pertaniannya, Gapoktanhut ini memberikan wadah dan membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya dan tidak dirugikan oleh kelompok lain agar tercapainya kesejahteraan bersama, sekarang perpindahan skema hutan menjadi hak kelola masyarakat sudah berhasil, tinggal masyarakat petaninya untuk melakukan penanaman dengan baik dan menghasilkan serta tidak melakukan ahli fungsi lahan⁵⁴”

Dari penjelasan diatas masyarakat sudah dibantu dalam pengelolaan hutan sebagai lahan pertanian yang sebagai mana menguntungkan bagi petani hutan, karena skema hutan sudah dilakukan transformasi menjadi hak kelola masyarakat yang sepenuhnya dikelola masyarakat dan tidak lagi bermitra dengan Perhutani. Namun, petani harus melakukan penanaman dengan baik dan tidak merusak hutan serta melakukan penghijauan hutan dan tidak membiarkan adanya kekosongan lahan, agar tujuan pemberdayaan petani berjalan dengan baik dan tidak dilakukan penarikan skema hutan yang berhasil diterapkan.

Tabel 4.2
Perpindahan Skema Hutan

Hutan Skema	Pepindahan Skema Hutan
Hutan Kemitraan	2019

⁵³ Jaelani, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

⁵⁴ Supriyanto, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

Hutan Kelola Masyarakat	2023
-------------------------	------

Tabel 4.3
Faktor Terjadinya Perlawanan Masyarakat Pinggir Hutan

Lembaga	Faktor
TORA	Adanya konflik tanah yang berada pada wilayah pemukiman masyarakat yang diklaim milik perhutani.
Perhutanan Sosial	Adanya perbedaan kebijakan pada pengelolaan hutan antara Gabungan Kelompok Tani Hutan dan Perhutani

Berikut ini merupakan pemaparan dari perlawanan masyarakat petani hutan yang ditemukan dari hasil data penelitian secara sistematis sesuai dengan konsep dari Resistensi sebagai berikut :

Resistensi petani adalah sebuah istilah baru dalam konsep sosiologi dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana petani berusaha bertahan dari tekanan penindasan yang terus-menerus. Perlawanan kaum petani memiliki keinginan yang positif demi tercapainya revolusi baru untuk menjadikan penggarapan lahannya tidak diganggu.

“Kelompok Tani Hutan melakukan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan Perhutani, karena masyarakat merasa dirugikan dan disulitkan, melakukan perlawanan ini petani memiliki keinginan yang positif untuk keberlangsungan hidup petani, untuk memikirkan masadepan anak cucunya, apabila dari kaum petani tidak melakukan penentangan atau menuruti saja, maka akan semakin dipandang rendah dan dirugikan dalam hal pengelolaan hutan⁵⁵”

Dari informasi diatas masyarakat petani hutan melakukan perlawanan sebagai bentuk mempertahankan haknya dan keberlangsungan

⁵⁵ Martoyo, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

hidup mereka, karena masyarakat petani hutan menggantungkan hidupnya pada alam sebagai modal mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bertani. Untuk tetap mempertahankan hak kelola tanahnya, masyarakat antusias untuk menjaga lahan pertaniannya dengan sungguh-sungguh, karena mayoritas petani hutan menggarap lahan bukan milik pribadi melainkan tanah milik Negara. Yang tentunya sewaktu-waktu akan muncul kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa lahan Negara yaitu Perum Perhutani yang diberikan hak untuk mengatur lahan Negara dan pengelolaan bersama masyarakat oleh Pemerintah. Maka dari itu, masyarakat petani hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku membentuk Lembaga GAPOKTANHUT guna untuk menjaga dan mempertahankan program-program yang dibuat sepenuhnya untuk membantu masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

Etika subsisten adalah prinsip yang mendahulukan keselamatan dan berprinsip untuk menghindari resiko-resiko yang mendatangkan bencana, para petani umumnya lebih memilih untuk bercocok tanam dengan kebutuhan pangan dari pada tanaman bukan pangan karena untuk keselamatan hidupnya. Ciri khas yang menonjol adalah para petani melakukan bercocok tanam lebih mengutamakan untuk menghindari kegagalan yang berujung kehancuran dan bukan berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil resiko.

“para petani bercocok tanam hanya memikirkan bagaimana tanaman yang ditanam bisa menghasilkan meskipun tidak banyak setidaknya bisa buat stok bahan pangan dirumah, daripada lahan

hutan ini ditanam sejenis kayu yang hasilnya besar tapi puluhan tahun baru panen⁵⁶”

Dari informasi diatas bahwa kaum petani lebih mengutamakan bercocok tanam dengan kebutuhan substensinya dari pada bercocoktanam jenis tanaman yang hasil panennya lama, karena petani hutan lebih mengutamakan kebutuhan pangan daripada mengambil resiko yang akan menghancurkan kehidupannya. Seperti halnya petani hutan di Desa Sidodadi mengambil bahan-bahan masakan dari hasil bercocoktanam di hutan, jadi petani menggantungkan kebutuhan bahan pangannya pada kebun mereka sendiri. Jenis tanaman yang mereka garap seperti cabai, terong, tomat, jambu kristal dan bahan pangan lainnya.

2. Bentuk resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten

Jember

Munculnya perlawanan kelompok masyarakat petani hutan di Desa Sidodadi terhadap kebijakan pengelolaan hutan kemitraan dalam kawasan perhutanan sosial melalui SK 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 telah ada sejak proses perumusan. Upaya penolakan termanifestasi ke dalam gerakan penolakan terhadap sistem penanaman serta aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan yang dinilai bersimpangan terhadap penanaman lahan pertanian dan berpotensi mengancam masa depan masyarakat petani pinggir hutan, sehingga melahirkan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat petani hutan.

⁵⁶ Jaelani, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

“perlawanan dilakukan karena penyimpangan kebijakan dan sistem pengelolaan hutan, masyarakat petani hutan berupaya untuk terus menentang kebijakan dari perhutani dengan mewakilkan anggotanya untuk melakukan rapat diruang terbuka dengan Perhutani demi untuk memperjuangkan hak petani hutan⁵⁷”

Dari informasi yang didapat kelompok masyarakat tani hutan melakukan tindakan secara terbuka, untuk menyalurkan ide-ide dan gagasan mengenai program kebijakan pengelolaan hutan yang menguntungkan bagi masyarakat. Dengan itu masyarakat petani hutan melakukan perlawanan secara sistematis dan terstruktur dengan cara pengajuan perpindahan skema hutan menjadi hak kelola masyarakat, namun perlawanan masyarakat petani hutan tidak hanya secara terbuka saja, tetapi melakukan perlawanan secara tertutup.

“perlawanan yang dilakukan petani hutan juga melibatkan seluruh unsur masyarakat petani hutan aktif untuk mendukung penentangan tersebut, karena perjuangan yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan maupun pribadi⁵⁸”

Dari informasi tersebut kelompok petani hutan melakukan perlawanan sebagai bentuk rasa saling mendukung akan pentingnya masadepan masyarakat petani, masyarakat petani melakukan perjuangan mengenai pengelolaan hutan agar sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dan juga merencanakan bagi regenerasi berikutnya, agar terjaminnya hidup dimasa yang akan datang. Pasca diturunkannya Skema hutan kemitraan bersama Perhutani pada tahun 2019, masyarakat petani merasa bahwa tidak bebas untuk mengelola hutan dengan penanaman sesuai

⁵⁷ Suroso, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

⁵⁸ Purwadi, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

kebutuhan substensi, dikarenakan tanaman yang sudah digarap seperti tanaman bahan pangan akan terancam rusak akibat dari permintaan Perhutani yang menginginkan jenis tanaman kayu di garap pada sela-sela garapan tanaman petani hutan.

Adapun bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat petani hutan di Desa Sidodadi sebagai berikut :

a. Perlawanan Tertutup

Perlawanan secara tertutup dilakukan oleh kelompok tani hutan dengan membentuk koalisi dengan petani hutan yang lain secara sembunyi-sembunyi, pembentukan koalisi ini tidak terstruktur dalam artian cepat bubar serta melakukan tindakan perlawanan yang bersifat individu. Aksi perlawanan ini dilakukan oleh masyarakat bawah. Untuk mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat petani hutan.

“petani hutan melakukan perlawanan dengan sembunyi-sembunyi serta bertindak secara individu terhadap kawasan hutan yang digarap perhutani dengan pembiaran kawasan garapan Perhutani menjadi tandus serta tidak terurus dan pencurian kayu milik perhutani⁵⁹”

Dari informasi diatas petani hutan melakukan tindakan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa lahan yaitu Perhutani. Dalam fenomena tersebut masyarakat petani hutan memiliki rasa kekecewaan dan kebencian terhadap Perhutani, karena didalam pemikiran masyarakat

⁵⁹ Taufik, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

petani hutan, kebijakan yang ditentukan Perhutani tidak menguntungkan bagi masyarakat dalam pengelolaan program Perhutanan sosial yang berada di Dusun Mandiku, ditambah lagi kasus Agraria yang pernah terjadi dikawasan Mandiku yaitu mengklaim tanah pemukiman warga milik Perhutani, sehingga dalam benak masyarakat citra nama Perhutani semakin buruk. Dalam hal itu masyarakat petani hutan bersifat anti Perhutani. Hal itu, diperkuat lagi oleh masyarakat petani hutan

“petani hutan melakukan pencurian kayu milik Perhutani dan pembiaran lahan tandus tidak terurus dengan beralasan untuk memberikan pelajaran dan pesan ancaman secara tertutup agar tidak ikut campur dalam kebijakan pengelolaan hutan masyarakat yang sistem penanamannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat⁶⁰”

Dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat petani melakukan perlawanan secara tidak terstruktur yang mengakibatkan tindakan pencurian serta perusakan garapan kayu milik Perhutani. Perlawanan ini dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang tidak paham akan skema hutan yang berada pada program Perhutanan Sosial. Masyarakat petani hutan menganggap bahwa hutan merupakan sumber penghasilan dan penghidupan mereka sejak nenek moyang dahulu.

Kebijakan penanaman pengelolaan terhadap hutan menimbulkan kegerahan, masyarakat petani hutan tetap berusaha menerapkan sistem penanaman sesuai kebutuhan substensi yang

⁶⁰ Martoyo, diwawancarai peneliti, Jember, 2 mei 2024

menurut mereka membantu kehidupan ekonomi mereka, dengan mengabaikan aturan yang berlaku di dalam kawasan. Perlawanan itu sebenarnya adalah proses pembentukan dari berbagai macam keresahan masyarakat yang sudah sejak lama terhadap kebijakan dan tata aturan Perhutani tentang pengelolaan sumber daya hutan.

Bentuk-bentuk perlawanan kaum masyarakat bawah mempunyai ciri khas yang menonjol yaitu pura-pura memperhatikan dan menurut, berlaku tidak jujur, pura-pura tidak tahu, pengrusakan dan mencuri. Perlawanan yang dilakukan masyarakat bawah terlihat pada aksi pencurian kayu dan pembiaran lahan milik Perhutani tidak terurus. Hal itu dilakukan karena dari kelas bawah yang sering kali tidak membutuhkan banyak koordinasi dan lebih aman karena merupakan upaya untuk menolong dirinya sendiri. Selain itu bentuk perlawanan secara tertutup yang dilakukan masyarakat kelas bawah tidak menjadi berita besar, bahkan kurang diperhatikan sehingga lebih aman, daripada melakukan perlawanan secara terbuka yang berurusan dengan aparat yang bersangkutan dan menjadi berita besar sehingga lebih beresiko. Dari pernyataan wawancara diatas di tambahkan oleh Bendahara Gapoktanhut

“masyarakat petani hutan melakukan aksi perlawanan dengan cara berbeda-beda ada yang sembunyi-sembunyi ada yang terang-terangan⁶¹”

⁶¹ Jaelani, diwawancarai peneliti, Jember, 3 mei 2024

Dari pernyataan diatas bahwa kaum petani hutan memiliki cara tersendiri dan perbedaan sikap dalam melakukan perlawanan terhadap pihak yang merugikannya. Perbedaan itu muncul, karena ada kaum petani bawah dan kaum petani atas, terdapat kaum yang lemah dan kaum yang berani untuk melakukan perlawanan secara terang-terangan. Dalam kehidupan masyarakat Desa antara kelas bawah dan kelas atas memiliki pandangan dan argument yang berbeda diantara keduanya. Perbedaan kepentingan antara kaum kelas bawah dan kelas atas merupakan faktor terjadinya konstruksi sosial yang mempunyai perbedaan. Kaum lemah seringkali menunjukkan posisi yang berbeda, ketika berada didepan penguasa mereka terlihat penurut, dan ketika dibelakang mereka melakukan aksi yang berlawanan. Perbedaan itulah yang membuat adanya perlawanan tertutup dan perlawanan terbuka.

b. Perlawanan Terbuka

Perlawanan secara terbuka dilakukan oleh masyarakat kelompok tani hutan yang mempunyai keberanian untuk menentang kepada pihak yang dianggap merugikannya secara terang-terangan, perlawanan ini dilakukan oleh pihak yang berintelektual dan mempunyai prinsip untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.

“aksi perlawanan yang dilakukan dengan secara matang, terencana dan terstruktur, kelompok tani melakukan penentangan dengan terbuka ditempat umum ketika rapat dengan penguasa lahan, atas ide-ide gagasan masyarakat kami suarakan secara terang-terangan kepada pihak yang bersangkutan, kami melakukan itu agar suara masyarakat

bawah petani hutan didengar oleh penguasa lahan serta keinginan dan gagasan masyarakat petani hutan diketahui oleh publik dalam pengelolaan tanah milik Negara dengan sistem yang memberdayakan masyarakat⁶²”

Dari hasil wawancara diatas oleh ketua Gapoktanhut bahwa, masyarakat petani hutan melakukan tindakan yang terang-terangan untuk menyampaikan keluhan kesah masyarakat bawah atas permasalahan dan kesulitan dalam mengelola hutan yang bersimpangan atas kebijakan antara keinginan masyarakat dan pihak Perhutani. Kebijakan Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan melibatkan perencanaan rasional, yang cenderung terlalu ambisius, dan dilakukan tanpa kecuali di semua wilayah, dengan keyakinan bahwa ini adalah cara terbaik dalam pengelolaan hutan. Sebagai sebuah strategi, rencana dilaksanakan di berbagai tempat, namun cenderung gagal.

Dalam ini hal ini, masyarakat merasa bahwa tanah yang mereka garap senantiasa milik hak pribadinya dikarenakan masyarakat petani hutan yang sudah lama menempati kawasan tersebut, sehingga dalam pemikiran masyarakat tanah penggarapan lahan pertanian adalah peninggalan dari nenek moyangnya dari puluhan tahun yang lalu. Masyarakat petani hutan di Mandiku sangat menggantungkan hidupnya pada hutan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, maka dari pihak masyarakat atas yang berintelektual memperjuangkan dan mempertahankan agar tanah yang dikelola sejak puluhan tahun tetap

⁶² Suroso, diwawancarai peneliti, Jember, 3 mei 2024

sepenuhnya di kelola oleh masyarakat petani hutan tanpa bersimpangan dengan penguasa lahan. Hal itu, di perkuat lagi oleh Bendahara Gapoktanhut sebagai berikut.

“masyarakat petani hutan dalam melakukan aksi perlawanan dengan mengumpulkan bukti-bukti penggarapan lahan yang dikelola masyarakat dengan bukti fisik seperti jenis tanaman yang digarap, bukti penghijauan kawasan hutan, bukti pembagian sertifikat perijinan pengelolaan lahan secara merata dan bukti sistem pengelolaan yang pro rakyat untuk memberdayakan petani hutan. Kami melakukan itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat dalam mengelola hutan, untuk aksi itu kami mempunyai jaringan relasi terhadap penguasa lahan yang pro dengan kami, untuk membantu pengajuan bukti-bukti fisik agar tersampaikan kepada kementerian kehutanan⁶³”

Dari informasi diatas masyarakat petani hutan melakukan aksi secara terbuka yang dilakukan oleh kaum kelas atas yang berintelektual dalam bentuk perlawanan secara sistematis dan terstruktur. Di tambahkan lagi oleh masyarakat petani hutan sebagai berikut

“kami melakukan penentangan secara terbuka atas ketidaksinkronan kebijakan yang dibuat didalam skema hutan kemitraan antara petani hutan dan Penguasa lahan, karena sistem mitra yang dilakukan tidak optimal justru mengancam kerugian petani, dalam kerugian yang kami rasakan adalah sistem bagi hasil yang tidak adil, karena petani sekarang sulit mendapatkan pupuk, hasil panen yang tidak nentu, ditambah permintaan dari perhutani untuk menanami kayu dilahan garapan petani yang cenderung merusak lahan pertanian yang kami garap⁶⁴”

Dari informasi yang didapat aksi perlawanan kaum atas lebih menantang dan lebih rumit dari pada perlawanan yang dilakukan oleh

⁶³ Jaelani, diwawancarai peneliti, Jember, 3 mei 2024

⁶⁴ Martoyo, diwawancarai peneliti, Jember, 3 mei 2024

kaum bawah. Perlawanan ini dilakukan dengan berhadapan langsung dengan penguasa lahan, tentu dalam hal ini, masyarakat petani penuh perjuangan untuk terlepas dari ikut campur atas kebijakan dari perhutani kepada masyarakat petani hutan untuk penggarapan lahan pertanian dikawasan hutan Mandiku. Aksi perlawanan ini merupakan suatu bentuk masyarakat petani hutan dalam hal, untuk membantu masyarakat kelas bawah dalam mewujudkan sistem pengelolaan hutan dengan sepenuhnya untuk masyarakat. Untuk melakukan tindakan ini masyarakat kelas atas membangun kerja sama dan menjalin hubungan dengan pihak lain adalah bagian dari karakter manusia sebagai makhluk sosial.

Setiap orang merasakan betapa pentingnya kehadiran orang lain untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Naluri berjuang untuk hidup ini membuat manusia bergantung pada orang lain saat ini dan di masa depan. Selain naluri untuk memperjuangkan hidup, naluri untuk melindungi diri dari berbagai ancaman juga memerlukan kerja sama dengan orang lain.. Perasaan aman akan didapat bila pertahanan diri dilakukan secara kebersamaan. Oleh karena itu, perlawanan oleh kaum atas akan mencari teman sepaham dan seperjuangan yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh circle yang seperti, ia harus menjalin relasi dan komunikasi dengan banyak kalangan.

Dalam upaya komunikasi tersebut terdapat unsur-unsur untuk membangun citra yang baik, keinginan yang baik, meyakinkan, mempengaruhi dan menanamkan kepercayaan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci peneliti melakukan wawancara kepada Bendahara Gapoktanhut mengenai aksi perlawanan atau penentangan masyarakat petani hutan

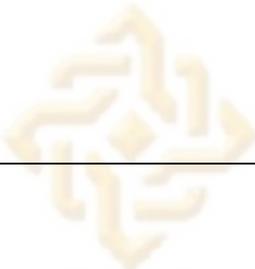
“penentangan yang kami lakukan kepada pihak Perhutani, dengan melakukan rapat diruang terbuka dengan penyampaian gagasan kami, serta mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait, butuh waktu yang lama sejak 2020 dan baru disahkan tahun 2023 oleh kementerian kehutanan. Hal itu, penuh perjuangan bagi kami, tujuan yang kami inginkan yaitu mengubah skema hutan kemitraan menjadi skema hutan kelola masyarakat yang nantinya Perhutani tidak mempunyai hak untuk memberikan kebijakan untuk pengelolaan sistem tanaman kepada kelompok tani hutan di Mandiku⁶⁵”

Dari informasi diatas aksi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas berhasil membawa kesejahteraan bagi petani, aksi perlawanan dilakukan membutuhkan waktu yang lama sekitar 4 tahun untuk membuahakan hasil manis dan kabar gembira kepada petani hutan dari kalangan atas maupun bawah.

Tabel 4.4
Bentuk Perlawanan Masyarakat Petani Hutan

Bentuk Perlawanan	Kelompok Masyarakat	Aksi Perlawanan
Secara tertutup	Masyarakat kelas bawah	Pencurian kayu, pembiaran lahan garapan perhutani tandus, pengrusakan lahan.
Secara terbuka	Masyarakat kelas atas	Melakukan protes sosial dengan penyampaian atas ide-ide dan gagasan diruang terbuka ketika

⁶⁵ Jaelani, diwawancarai peneliti, Jember, 3 mei 2024

		rapat dengan penguasa lahan, pengumpulan bukti-bukti fisik yang terstruktur mengenai pengelolaan hutan masyarakat.
--	---	--

C. Pembahasan Temuan

Temuan penelitian adalah data yang diperoleh dilapangan melalui hasil penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi sehingga menghasilkan pembahasan temuan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di kelompok masyarakat petani hutan, mengalami keresahan atas konflik tanah yang terjadi diwilayah pemukiman warga akibat dari adanya pengklaiman tanah Mandiku milik Perhutani, dengan dipasang patok-patok besar tanpa komunikasi dan tanpa sepengetahuan masyarakat petani hutan Mandiku, sehingga masyarakat mengalami keresahan dan ketidakadilan akibat dari status kepemilikan tanah yang simpang siur.

Masyarakat menganggap bahwa tanah Mandiku adalah peninggalan dari nenek moyangnya sejak puluhan tahun lalu dan masyarakat menggantungkan hidupnya pada tanah yang selama ini mereka tempati untuk keberlangsungan hidupnya. Dari adanya masalah pertanahan yang dihadapi masyarakat Mandiku melahirkan aksi perlawanan

masyarakat petani pinggir hutan yang masuk dalam wilayah TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Desa Sidodadi terdapat 2 lembaga yaitu TORA dan PS yang dimana TORA mengurus untuk membantu masyarakat dalam wilayah pemukiman warga yang terjadi konflik status kepemilikan tanah di Mandiku. Di dalam program PS (Perhutanan Sosial) memfokuskan untuk membantu masyarakat dalam pengelolaan hutan negara yang didalamnya terdapat lahan pertanian yang masyarakat garap, dalam PS ini masyarakat petani hutan membentuk Gabungan kelompok petani hutan untuk mengatur sistem pengelolaan hutan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan substansi masyarakat.

Dengan adanya, program PS yang di turunkan dari Pemerintah, membuat masyarakat berpeluang untuk ikut andil dalam mengelola hutan, didalam Desa Sidodadi Dusun Mandiku terdapat kawasan hutan dengan luas 743 hektar yang termasuk hutan aktif dikelola masyarakat. Dalam pengelolaan hutan ini mengusung skema hutan kemitraan dengan Perhutani, sejak pasca diturunkannya SK bermitra dengan Perhutani pada tahun 2019 dengan nomor SK 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 untuk mengelola hutan dengan adil dan saling menguntungkan antara Perhutani dan masyarakat petani hutan dengan tujuan memberdayakan masyarakat.

Namun, sistem kemitraan ini tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan masyarakat petani hutan dengan Perhutani memiliki keinginan kebijakan yang berbeda dalam mengelola hutan, masyarakat

petani hutan meminta kebijakan penanaman sesuai dengan kebutuhan substansi masyarakat dengan beralasan agar masyarakat merasakan manfaat dari program PS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan sistem bagi hasil ketika musim panen, masyarakat dalam praktiknya menunjukkan bahwa masyarakat petani hutan memiliki pemahaman yang cukup tinggi terhadap pengelolaan sumber daya hutan, dengan konsep pemanfaatan hutan dengan jangka panjang. Hal ini didukung oleh rasa memiliki terhadap hutan oleh masyarakat petani hutan sehingga mereka tidak berkeinginan untuk merusak hutan. Dari pihak perhutani meminta penanaman jenis kayu yang sistem penanamannya berada disela-sela tanaman masyarakat petani hutan. Hal itu membuat perubahan tata ruang pertanian yang cenderung mengalami kegagalan.

Dalam bermitra ini, masyarakat petani hutan merasa dirugikan karena sistem bagi hasil yang tidak adil. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini hampir diberbagai kawasan hutan yang dikelola masyarakat adalah system bagi hasil 10% yang diterapkan oleh Perhutani. Hal itu dilakukan Perhutani menyama ratakan jumlah pajak pada masyarakat yang bertani di dalam hutan, kesalahannya adalah tidak melakukan survey terlebih dulu untuk setiap luas lahan dan hasil panen masyarakat. Dikarenakan musim panen yang tidak nentu, pupuk semakin sulit dan mahal sehingga petani hutan merasa kesulitan untuk bermitra dengan Perhutani, ditambah kebijakan Perhutani meminta untuk jenis tanaman di tanami kayu yang cenderung merusak tanaman masyarakat

petani hutan sebelumnya dan merugikan. Hal itu melahirkan faktor penentangan atau perlawanan masyarakat petani hutan terhadap Perhutani. Resistensi merupakan sebuah sikap perlawanan yang berusaha untuk bertahan terhadap sesuatu yang menekannya. Dari faktor-faktor yang membuat masyarakat petani merasa dirugikan dan adanya tekanan dari pihak penguasa lahan, maka melahirkan sebagai bentuk perlawanan kaum petani.

2. Bentuk resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di kelompok masyarakat petani hutan, bentuk perlawanan terbentuk menjadi dua aksi yaitu perlawanan tertutup dan perlawanan terbuka. Perlawanan tertutup dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dengan melakukan aksi seperti pencurian, pengrusakan dan tidak menaati peraturan yang berlaku. Sedangkan, perlawanan terbuka dilakukan oleh masyarakat kelas atas yang berintelektual dengan melakukan protes sosial diruang terbuka untuk menyalurkan aspirasinya kepada penguasa.

Masyarakat petani hutan di Mandiku melakukan bentuk perlawanan dengan dua aksi antara lain secara tertutup, perlawanan ini dilakukan oleh kaum petani bawah dengan pencurian kayu milik Perhutani, pembiaran lahan tidak terurus dan pengrusakan garapan lahan milik Perhutani. Perlawanan ini dilakukan oleh individu-individu

masyarakat sebagai bentuk aksinya melakukan perlawanan, tetapi tidak dengan secara langsung kepada penguasa lahan. Perlawanan terbuka dilakukan oleh masyarakat kelas atas, aksi ini dilakukan secara terstruktur, berprinsip dan berkelanjutan dengan tujuan perubahan yang baik. Kelompok tani hutan Mandiku melakukan aksi perlawanan dengan melakukan protes sosial didepan penguasa lahan untuk menyalurkan gagasan dan ide-ide tentang pengelolaan hutan yang memberdayakan masyarakat, aksi perlawanan ini juga terencana. Maka kelompok tani hutan dalam perlawanan ini berencana mengubah skema hutan kemitraan menjadi skema hutan kemasyarakatan. Dalam perlawanan yang terstruktur dan terencana ini, masyarakat petani hutan berhasil mengubah skema hutan menjadi hutan kemasyarakatan pada tahun 2023 dengan nomor SK. 5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan hasil temuan di lapangan, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai resistensi yang dilakukan oleh masyarakat petani hutan dalam mempertahankan kebijakan dengan sistem pengelolaan sesuai kebutuhan substensi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Faktor yang melahirkan resistensi masyarakat petani hutan di Desa Sidodadi adalah adanya konflik agraria tentang permasalahan tanah yang terjadi pada pemukiman warga. Didalam Desa Sidodadi terdapat 2 lembaga yaitu TORA dan PS. Tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial (PS). Dalam praktiknya, lahan yang termasuk dalam TORA dan PS akan dibuat perklastrer dan dikelola oleh kelompok masyarakat terutama untuk diberdayakan di bidang pangan untuk kebutuhan substensi. Namun, pada realitanya didalam program PS yang berada di Desa Sidodadi, sejak diturunkannya SK 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 dengan sistem mitra antara masyarakat petani hutan dengan Perhutani justru menimbulkan terjadinya resistensi dan penentangan dikarenakan ketidaksinkronan antara kebijakan Perhutani dengan masyarakat petani hutan. Dengan adanya ketidaksinkronan dalam mitra tersebut masyarakat petani hutan mengubah skema hutan menjadi skema hutan kemasyarakatan.

2. Bentuk-bentuk perlawanan yang terjadi di Desa Sidodadi merupakan bentuk perlawanan secara terbuka dan tertutup. Perlawanan tertutup yang terjadi adalah bentuk perlawanan seperti mencuri kayu milik Perhutani dan pembiaran lahan garapan Perhutani tidak terurus yang mengakibatkan kerusakan hutan. Perlawanan secara tertutup ini dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang tergolong pendidikannya rendah. Perlawanan terbuka dilakukan dengan melakukan protes sosial terhadap penguasa lahan secara langsung dengan menyampaikan gagasan-gagasan dan ide tentang pengelolaan hutan. Perlawanan ini dilakukan oleh masyarakat kelas atas yang berintelektual, sehingga bentuk perlawanan ini terstruktur dan terencana dengan tujuan yang positif. Perlawanan secara terbuka ini berhasil mengubah skema hutan kemitraan menjadi skema hutan kemasyarakatan pada tahun 2023 dengan nomor SK 5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023, yang dimana dengan berhasilnya perpindahan skema hutan tersebut, maka Perhutani tidak mempunyai hak untuk mengelola hutan di kawasan hutan Mandiku.

B. SARAN-SARAN

Bagian sub bab ini merupakan bagian yang terpenting dalam melakukan penelitian pada akhir penulisan. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai inspirasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perhutanan sosial. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini bukanlah hasil penelitian yang sempurna, maka perlu adanya peningkatan bagi peneliti selanjutnya supaya memperoleh hasil penelitian yang sempurna.
2. Bagi Gapoktanhut, Lembaga yang menaungi masyarakat petani hutan, terus mempunyai ide-ide gagasan dalam menerapkan program-program pengelolaan hutan yang memberdayakan masyarakat serta membantu masyarakat hutan dalam sistem pengelolaan hutan kedepannya.
3. Bagi masyarakat petani sekitar hutan, haruslah ada dukungan yang seimbang agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Melakukan aksi pencurian kayu secara terus menerus selain beresiko juga dapat merusak hutan, dengan perpindahan skema hutan menjadi hutan kemasyarakatan ini adalah peluang besar bagi masyarakat petani hutan, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjelaskan perlawanan masyarakat sekitar hutan sebagai upaya mempertahankan penghidupan mereka. Berdasarkan hasil yang dicapai, masyarakat melakukan berbagai aksi perlawanan berdasarkan tekanan ekonomi dan kelangsungan hidup di

masa depan. Jika Anda sedang menyelidiki topik yang sama untuk penelitian lebih lanjut, Anda dapat menganalisisnya dengan memberikan pemetaan sosial terkait isu-isu sosial saat ini dan pemangku kepentingan. Memanfaatkan fungsi hutan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Fauzia, Hasna Mutiara Ayu, “Resistensi Masyarakat Sekitar Hutan”, Skripsi Universitas Brawijaya, Desember 2018.
- Bungin, Burhan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Djauhari, Mohammad, “*Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin*”, (Bogor: Konsorium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan, 2017).
- Ekologi, Doktor Antropologi, “Strategi Perlawanan Berkedok Kolaborasi Sebuah Tinjauan Antropologi Kasus Penguasaan Hutan” (Jurnal Partner Tahun 2018 Nomor 2).
- Fadhillah, R.A, “Wawancara” (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021).
- Fikri, Ilham, “Pengertian reistensi”, detikBali, 2022.
- Hutan, Lindungi, link <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-hutan-menurut-ahli/>.
- Kasiram, Moh, “*Metode Penelitian*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 119.
- Komisi II,” Konflik agrarian”, 2023, link <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44063/t/Konflik+Agraria+Adalah+Buah+Ketidakadilan+Struktural>.
- Masruroh, “Upaya Pengembangan Sikap Sosial Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Malang,” (Skripsi, UIN Malang, 2017).
- Moleong, Lexy J, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Muarif Fitrah, Muhammad rifa,” Resistensi dalam kajian manajemen perubahan dan pendidikan”, 2022.
- Net, Sidodadi, link <https://sidodadi.net/index.php/profil-des/>.
- Putri, Alifia Imananda, “Resolusi Konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember” (Jurnal Vol. 6 No. 3 2020).

Ramadhan, Muhammad, “*Metode Penelitian*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Repository, “Pemberdayaan masyarakat bab II landasan teoritis”, UIN Suska.

Rokhmad, Abu, “Petani vs Negara Studi Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqih” (Jurnal Edudeena Vol. 1 No. 2 Juli 2018).

Sidiq, Umar, “*Metodologi Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*”, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019).

Sidodadi, Desa, Wordpress Dalam Link <https://sidodadijember.wordpress.com/>

Sosial, Perhutanan,” kehutanan Lampung, Areal perhutanan social”, link [https://dishut.lampungprov.go.id/pages/perhutanan-sosial#:~:text=Kemitraan%20Kehutanan%20\(KK\)%20merupakan%20adanya,Usaha%20Industri%20Primer%20Hasil%20Hutan.](https://dishut.lampungprov.go.id/pages/perhutanan-sosial#:~:text=Kemitraan%20Kehutanan%20(KK)%20merupakan%20adanya,Usaha%20Industri%20Primer%20Hasil%20Hutan.)

Sosial, Perhutanan,” Pengertian, tujuan, skema dan tata cara permohonan”, link <https://cdkmalang.dishut.jatimprov.go.id/perhutanan-sosial-pengertian-tujuan-skema-dan-tata-cara-permohonan/>.

Sri Rejeki, Dr. Endang,” Karakteristik masyarakat desa pinggir hutan”, Hal 6.

Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), 246.

Suharyat, Yayat, “*Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*”, (Klaten: Lakeisha, 2022).

Supriyanto, Herman, “*Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin*”, (Bogor:Konsorium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan,2017).

Susetyo, Pramono Dwi, “Problem mendasar perhutanan social”, 19-Jun-2021.

Suyuti, Imam, “KPH Jember”, 2022, link <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/kph-jember/>.

Syafrudin, “Gerakan Perlawanan atas Penguasaan Sumber Daya Hutan Masyarakat Adat” (Jurnal Vol.21 No.1 Oktober 2021).

Teori, Solidaritas, Dalam Link <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/64c7c0be08a8b5417c0abea2/teori-sosiologi-emile-durkheim-memahami-solidaritas-sosial-dan-integrasi-masyarakat>

Universitas Kiai Ahmad Shiddiq Jember 2022 "Pedoman Karya Ilmiah".

Utomo, Dr. Warsito, "jurnal substansi pengelolaan lingkungan sumber daya hutan", 2018.

Wiridianata, Wahyu, "Kehutanan di Indonesia dalam perspektif ekonomi, ekosistem dan hukum".

Yusuf, Muhammad, Qodir, Zuly, "Resistensi Atas Kebijakan Pengelola Hutan" (Jurnal Vol. 1 No. 2 Juni 2018).

Yuswadi, Hary, "*Pola Resistensi : Variasi dan Struktur Resistensi Petani di Pedesaan*", (Jember : Media Cipta Perkasa, 2022).



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meyco Danu Pradana
NIM : 204103020006
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan Di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15-Mei-2024

Penulis



Meyco Danu Pradana
204103020006

PEDOMAN WAWANCARA

- Pedoman Wawancara

Peneliti

Narasumber : Ketua, sekretaris, Bendahara Gabungan Kelompok Tani Hutan Sidomukti

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<p>Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi masyarakat pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menyebabkan terjadinya perlawanan di kawasan hutan kemitraan yang di naungi oleh Gapoktanhut? 1. Apa kebijakan yang diterapkan pada masyarakat tani hutan untuk penggarapan lahan ? 2. Apa yang menjadikan indikator permasalahan sehingga muncul sebuah problem baru dikawasan hutan Mandiku?
<p>Bagaimana bentuk resistensi masyarakat pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pinggir hutan? 2. Bagaimana proses terjadinya perlawanan itu terjadi dikawasan hutan Mandiku?

Narasumber : Tiga Masyarakat Petani Pinggir Hutan

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<p>Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi penyebab utama dalam perlawanan masyarakat pinggir hutan itu terjadi? 2. Apakah dengan adanya kasus perlawanan masyarakat pinggir hutan yang pernah terjadi, sekarang terulang kembali? 3. Apa harapan masyarakat kedepannya untuk menjadikan kawasan tempat tinggalnya dan tempat penggarapan lahan hutan menjadi aman dan tidak

	terulang seperti kasus sebelumnya?
Bagaimana bentuk perlawanan masyarakat pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut pandangan masyarakat mengenai perlawanan yang terjadi? 2. Bagaimana masyarakat untuk ikut andil mempertahankan hak tanahnya sebagai bentuk perlawanan?



- Pedoman Observasi

No	Aspek Observasi	Hasil yang Dituju
1.	Tujuan	Mendapatkan gambaran umum terkait permasalahan masyarakat pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku
2.	Objek Observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengamatan Lokasi Dusun Mandiku "GAPOKTANHUT" Secara langsung. 2. Mencari informasi dan melakukan observasi kondisi kelompok tani hutan Serta masyarakat sekitar hutan. 3. Mencari permasalahan yang terjadi pada kelompok tani hutan "GAPOKTANHUT" Dan sumber yang diperoleh untuk mengetahui problem itu berlangsung.
3.	Waktu	Tiga minggu (Menyesuaikan)
4.	Lokasi	Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
5.	Alat Observasi	Alat Tulis (Atk). Kamera

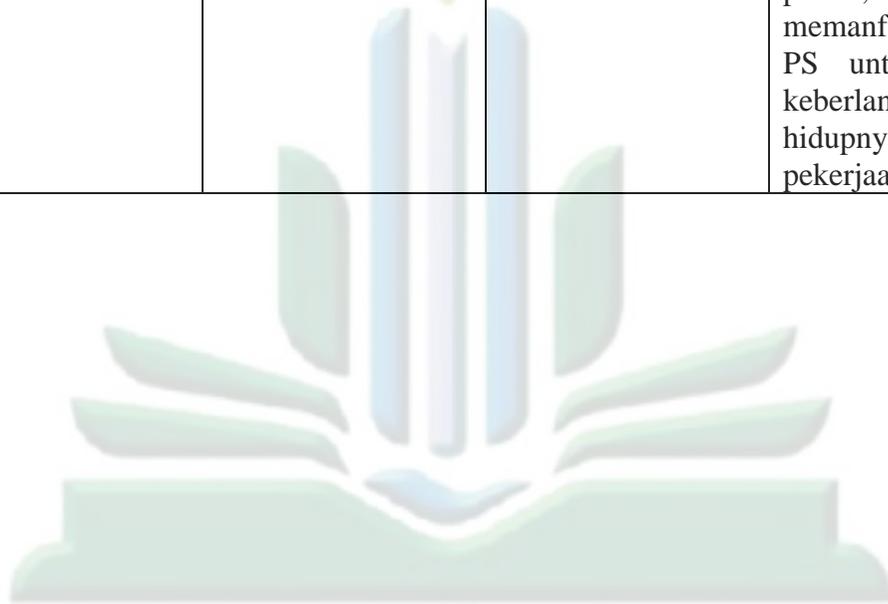
- Pedoman Dokumentasi

No	Aspek yang diteliti
1.	Dokumen kegiatan kelompok tani hutan dalam penggarapan lahan
2.	Dokumen masyarakat pinggir hutan untuk mempertahankan hak tanahnya
3.	Struktur kelompok tani hutan "GAPOKTANHUT"
4.	Dokumen tujuan didirikan kelompok tani hutan "GAPOKTANHUT"
5.	Laporan hasil kegiatan kelompok tani hutan mengenai kebijakan tanaman hutan
6.	Dokumentasi foto penelitian lainnya.

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan Di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	Resistensi	Pengertian Resistensi	Resistensi atau perlawanan merupakan suatu tindakan menentang, menghalau, melawan suatu perintah yang datang dari luar. O'connor menjelaskan bahwa resistensi adalah suatu sikap menolak, menentang, menyanggah dari pada anggota organisasi untuk bekerja sama dengan organisasi seiring dengan upaya untuk perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jenis penelitian, Pendekatan : Metode Kualitatif Deskriptif. ○ Lokasi Penelitian Terletak Di Desa Sidodadi Dusun Mandiku ○ Subyek penelitian utama dalam penggalan data yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara Gapoktanhut, Anggota Gapoktanhut, Masyarakat Sekitar Hutan. ○ Teknik Pengumpulan Data: Dokumentasi, dokumentasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana bentuk resistensi atau perlawanan masyarakat petani pinggir hutan di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo
		Bentuk-bentuk resistensi	Bentuk resistensi ada 2 yaitu perlawanan tertutup dan terbuka. Perlawanan tertutup dilakukan dengan gosip, fitnah, pencurian. Perlawanan terbuka		

			dilakukan dengan protes sosial, demonstrasi.	wawancara	Kabupaten Jember ?
Masyarakat Petani Hutan	Gabungan Kelompok Tani Hutan	Gapoktanhut adalah gabungan kelompok tani hutan yang beraktivitas sebagai petani, yang memanfaatkan program PS untuk mencukupi keberlangsungan hidupnya dan pekerjaannya.		<ul style="list-style-type: none"> ○ Analisis Data: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. ○ Keabsahan Data. ○ Tahap-Tahap Penelitian : Pra Lapangan, Tahap Pelaksanaan Penelitian Dan Tahap Penyelesaian. 	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER**

No	Hari, Tanggal	Jadwal Kegiatan	Keterangan
1	Jum'at, 15 Maret 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian	
2	Rabu, 20 Maret 2024	Wawancara Kepada Ketua Gapoktanhut Sidomukti	
3	Rabu, 27 Maret 2024	Wawancara Kepada Sekretaris Gapoktanhut Sidomukti	
4	Minggu, 07 April 2024	Wawancara Kepada Bendahara Gapoktanhut Sidomukti	
5	Rabu, 17 April 2024	Wawancara Kepada Masyarakat Petani Hutan	
6	Rabu, 02 Mei 2024	Wawancara Kepada Masyarakat Petani Hutan	
7	Kamis, 03 Mei 2024	Wawancara Kepada Masyarakat Petani Hutan	

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B. 809 /Un. 22/6. a/PP. 00.91 3 /2024 12 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Permononan Tempat Peneitian Skripsi

Yth.

Gapoktanhut Sido Mukti

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Meyco Danu Pradana
NIM : 204103020006
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan peneitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember."

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

**GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN (GAPOKTANHUT)
SIDOMUKTI**

Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
Telp : +62 813-3604-1100

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/Sket/GAPOKTANHUT/GPKH/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Bendahara Gapoktanhut Sidomukti menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Meyco Danu Pradana
NIM	: 204103020006
Fakultas	: Dakwah
Prodi/Semester	: PMI/ Delapan
Judul Skripsi	: Studi Resistensi Masyarakat Pinggir Hutan Di Desa Sidodadi Dusun Mandiku Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian yang bertempat di Desa Sidodadi, Dusun Mandiku, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember di mulai dari tanggal 20 maret 2024 s/d 4 mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Mei 2024
Bendahara Gapoktanhut Sidomukti

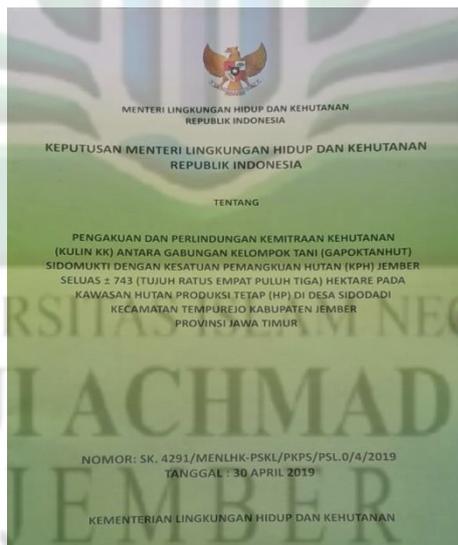


Jaelani

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI



Gambar.1 Kawasan Hutan Desa Sidodadi Dusun Manduku



Gambar.2 Skema Hutan Kemitraan 2019

KULIN KK & IPHPS YANG SUDAH DI TRANSFORMASI PS DI PROVINSI JAWA TIMUR						
No	KABUPATEN	KAB/KOTA	NAMA OPS	NO SK	LUAS SK (HA)	STATUS TRANSFORMASI
1	Kabupaten Jember	Desa Sidodadi	GAPOKTANHUT SIDOMUKTI	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
2	Kabupaten Blora	Kecamatan Bawak	GAPOKTANHUT BAWAK	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	200	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
3	Kabupaten Blora	Kecamatan Bawak	GAPOKTANHUT BAWAK	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	4.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
4	Kabupaten Jember	Kecamatan Manduku	GAPOKTANHUT MANDUKU	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	2.375	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
5	Kabupaten Jember	Kecamatan Manduku	GAPOKTANHUT MANDUKU	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	200	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
6	Kabupaten Jember	Kecamatan Manduku	GAPOKTANHUT MANDUKU	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
7	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
8	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
9	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
10	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
11	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
12	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
13	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
14	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
15	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
16	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
17	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
18	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
19	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
20	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
21	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
22	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
23	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
24	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
25	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
26	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019
27	KPHPS	Manduku	KPH Sidodadi	SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019	1.000	100% SK. 4291/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019

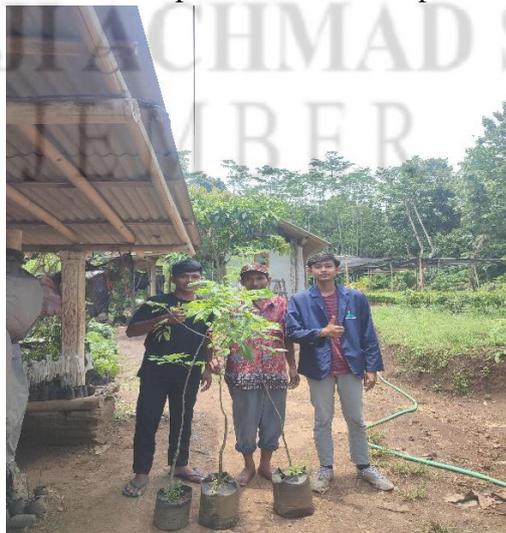
Gambar.3 Perpindahan Skema Hutan Kemasyarakatan 2023



Gambar.4 Wawancara Kepada Bendahara Gapoktanhut Sidomukti



Gambar.5 Wawancara Kepada Sekretaris Gapoktanhut Sidomukti



Gambar.6 Wawancara Kepada Ketua Gapoktanhut Sidomukti



Gambar.7 Wawancara Bersama Masyarakat Petani Hutan



Gambar.8 Jenis Tanaman Masyarakat Petani Hutan



Gambar.9 Kondisi Lahan Pertanian Masyarakat Petani Hutan

BIODATA PENULIS



Nama : Meyco Danu Pradana
NIM : 2041030220006
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 03-Mei-2002
Alamat : Desa Darungan, Kec. Yosowilangun, Kab.
Lumajang

Riwayat Pendidikan:

TK DHARMA WANITA : 2006-2008
SDN 01 Darungan : 2008-2014
SMPN 01 Kunir : 2014-2017
MAN Lumajang : 2017-2020
UIN Kiai Achmad Siddiq Jember : 2020-2024

Riwayat Organisasi

1. KOMPAS PMI : 2022-2023